

Sinergi Etika Bisnis dan Tata Kelola: Pilar Utama Bisnis yang Berkelanjutan

by Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Submission date: 06-Jul-2026 02:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2756368155

File name: Sinergi_Etika_Bisnis_-_Gita_Putri_Arisandi_-_revisi.docx (171.13K)

Word count: 26646

Character count: 189582

Sinergi Etika Bisnis dan Tata Kelola: Pilar Utama Bisnis yang Berkelanjutan

Gita Putri Arisandi

Dr. Zeni Rusmawati, S.Pd., M.Pd., CPFRA

Halimatus Sa'diyah, S.E., M.Ak., CPFRA

Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Sinergi Etika Bisnis dan Tata Kelola: Pilar Utama Bisnis yang Berkelanjutan ini dapat terselesaikan dan hadir di hadapan pembaca.

Dinamika dunia usaha modern saat ini menuntut perusahaan untuk tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, melainkan juga harus memikul tanggung jawab sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Buku ini disusun sebagai panduan komprehensif untuk menjawab tantangan tersebut. Secara garis besar, karya ini mengupas bagaimana nilai-nilai moral dan etika diintegrasikan ke dalam mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) guna menciptakan ekosistem bisnis yang tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan (*sustainable*).

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, rekan sejawat, yang telah memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi lahirnya karya ini.

Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Jakarta, 02 Maret 2026

**Gita Putri Arisandi, Dr. Zeni Rusmawati, S.Pd., M.Pd., CPFRA,
Halimatus Sa'diyah, S.E., M.Ak., CPFRA**

DAFTAR ISI

PRAKATA..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI v

BAB 1 Konsep Dasar Etika Bisnis 1

1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Bisnis..... 3

1.2. Nilai Moral dan Prinsip Dasar dalam Dunia
Usaha 8

1.3. Hubungan Etika, Hukum, dan Tanggung
Jawab Sosial..... 13

1.4. Teori-Teori Etika dalam Pengambilan
Keputusan Bisnis 17

1.5. Peran Etika dalam Membangun Reputasi
dan Kepercayaan Publik 20

Bab 2 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) 26

2.1. Pengertian dan Tujuan Tata Kelola
Perusahaan 30

2.2. Prinsip-Prinsip GCG: Transparansi,
Akuntabilitas, Responsibilitas,
Independensi, Kewajaran..... 33

2.3. Struktur Organisasi Tata Kelola: RUPS,
Direksi, Komisaris, Komite-Komite
Pendukung..... 40

2.4. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Internal	46
2.5. Peran GCG dalam Meningkatkan Kinerja dan Keberlanjutan Perusahaan	49
Bab 3 Sinergi Etika dan Tata Kelola dalam Dunia Bisnis	55
3.1. Hubungan dan Keselarasan antara Etika dan Tata Kelola	58
3.2. Etika sebagai Fondasi Moral bagi Tata Kelola yang Efektif	69
3.3. Penerapan Nilai-Nilai Etis dalam Praktik <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	72
3.4. Contoh Kasus Pelanggaran Etika dan Dampaknya terhadap <i>Governance</i>	74
3.5. Model Integrasi Etika dan Tata Kelola dalam Organisasi Modern	84
Bab 4 Membangun Bisnis yang Berkelanjutan (<i>Sustainability</i>)	99
4.1. Konsep Keberlanjutan dalam Konteks Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan	102
4.2. Peran Etika dan Tata Kelola dalam Menciptakan Bisnis Berkelanjutan	105
4.3. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) sebagai Manifestasi Etika Korporasi	110
4.4. ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>) sebagai Indikator Bisnis Berkelanjutan	112

4.5. Praktik Terbaik Keberlanjutan di Perusahaan Nasional dan Global.....	121
Bab 5 Strategi Implementasi dan Penguatan Sinergi	128
5.1. Tantangan Implementasi Etika dan Tata Kelola di Era Digital.....	130
5.2. Pengembangan Budaya Organisasi yang Beretika	133
5.3. Penguatan Sistem Kepatuhan (<i>Compliance System</i>)	136
5.4. Peran Kepemimpinan Etis dalam Menjaga Integritas Bisnis	139
5.5. Arah Masa Depan Etika dan Tata Kelola Menuju Bisnis Berkelanjutan.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	148

BAB 1

Konsep Dasar Etika Bisnis

Konsep dasar etika bisnis merupakan landasan penting dalam memahami bagaimana kegiatan ekonomi seharusnya dijalankan secara bertanggung jawab. Etika bisnis berkaitan dengan penerapan nilai, norma, dan prinsip moral dalam aktivitas bisnis sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak sosial, hukum, dan moral terhadap berbagai pihak yang terlibat. Dalam dunia usaha modern, penerapan etika bisnis menjadi semakin penting karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang transparan, adil, dan berkelanjutan (Crane *et al.*, 2019).

Konsep dasar etika bisnis juga berkaitan dengan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam praktik bisnis modern, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, etika bisnis menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan sehingga tercipta

hubungan yang harmonis dan berkelanjutan (Carroll & Brown, 2022).

Konsep dasar etika bisnis menekankan pentingnya nilai moral dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus mampu mempertimbangkan aspek moral dalam setiap tindakan yang dilakukan. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Ustien, 2025).

Konsep dasar etika bisnis juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Dalam perspektif etika bisnis modern, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Crane *et al.*, 2019).

Selain tanggung jawab sosial, konsep dasar etika bisnis juga berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Tata kelola perusahaan yang etis menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan organisasi. Melalui penerapan tata kelola yang baik, perusahaan dapat mencegah berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi,

manipulasi laporan keuangan, maupun penyalahgunaan wewenang dalam organisasi (Ferrell *et al.*, 2021).

Konsep etika bisnis juga semakin dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Perusahaan saat ini beroperasi dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terhubung secara global, sehingga standar etika yang diterapkan juga harus mempertimbangkan perbedaan budaya, regulasi, dan harapan masyarakat di berbagai negara. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan kebijakan etika yang jelas dan konsisten agar dapat menjaga kepercayaan publik dalam lingkungan bisnis yang dinamis (Crane *et al.*, 2019).

Penerapan konsep dasar etika bisnis juga memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, memperoleh kepercayaan dari konsumen dan investor, serta mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Etika bisnis berperan penting dalam membangun citra positif perusahaan serta meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepercayaan publik (Ustien, 2025).

Untuk memahami konsep etika bisnis secara lebih komprehensif, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengkaji terlebih dahulu pengertian etika bisnis sebagai landasan teoretis dalam pembahasan selanjutnya.

1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Bisnis

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan

bisnis agar dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Etika bisnis mengatur bagaimana pelaku usaha mengambil keputusan serta berperilaku dalam hubungan dengan konsumen, karyawan, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat.

Etika bisnis menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Dengan adanya etika bisnis, perusahaan diharapkan mampu menciptakan kepercayaan, menjaga reputasi, serta membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait. Menurut Ferrell *et al.*, 2021, etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan perilaku yang dapat diterima dalam organisasi bisnis serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu moral dalam dunia usaha.

Selain itu, Crane *et al.*, 2019 menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan studi mengenai situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis yang menimbulkan persoalan benar atau salah secara moral. Kajian ini tidak hanya memfokuskan pada tindakan individu dalam organisasi, tetapi juga pada kebijakan perusahaan, struktur organisasi, serta dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, etika bisnis memiliki peran penting dalam membantu perusahaan memahami tanggung jawab moralnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Etika bisnis merupakan penerapan prinsip-prinsip etika umum dalam konteks aktivitas bisnis. Prinsip tersebut digunakan untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh

perusahaan, manajer, maupun karyawan agar sejalan dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, etika bisnis tidak hanya menjadi teori normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam menghadapi dilema moral yang sering muncul dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis juga dipahami sebagai standar moral yang menentukan benar atau salahnya perilaku dalam organisasi bisnis serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Firmansyah *et al.*, 2021).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah seperangkat prinsip, nilai, dan norma moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis agar aktivitas ekonomi dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Etika bisnis juga berfungsi sebagai dasar bagi organisasi dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak moral, sosial, dan ekonomi dari setiap tindakan yang dilakukan.

2. Ruang Lingkup Etika Bisnis

Ruang lingkup etika bisnis mencakup berbagai aspek moral yang berkaitan dengan aktivitas bisnis serta hubungan antara organisasi dengan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa etika bisnis tidak hanya berfokus pada perilaku individu dalam organisasi, tetapi juga mencakup kebijakan perusahaan, praktik manajemen, serta dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, etika bisnis mencakup seluruh dimensi moral yang muncul dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa.

Salah satu ruang lingkup utama etika bisnis adalah etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks ini, para pelaku bisnis dan manajer diharapkan mampu mempertimbangkan aspek moral dalam setiap keputusan yang diambil. Keputusan bisnis yang etis harus memperhatikan prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut (Crane *et al.*, 2019), pengambilan keputusan yang etis dalam bisnis memerlukan pertimbangan terhadap konsekuensi moral dari suatu tindakan serta dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan.

Ruang lingkup etika bisnis juga meliputi hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam kegiatan bisnis mencakup karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, pemerintah, serta masyarakat luas. Dalam hubungan tersebut, etika bisnis menuntut perusahaan untuk bertindak secara adil dan bertanggung jawab, misalnya dengan memberikan upah yang layak kepada karyawan, menyediakan produk yang aman dan berkualitas bagi konsumen, serta menjalankan praktik perdagangan yang jujur dengan mitra usaha. (Ferrell *et al.*, 2021) menegaskan bahwa perusahaan yang menerapkan etika bisnis harus mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan agar tercipta hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Selain itu, ruang lingkup etika bisnis mencakup tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Dalam perspektif etika bisnis modern, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan menjalankan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Menurut Arianto (2024), tanggung jawab sosial merupakan bagian integral dari etika bisnis karena aktivitas perusahaan selalu memiliki implikasi moral terhadap masyarakat luas. Dalam praktiknya, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) menjadi wujud nyata dari penerapan etika bisnis yang menekankan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Ruang lingkup etika bisnis juga mencakup tata kelola perusahaan yang baik atau *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang etis menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan organisasi. Melalui penerapan tata kelola yang baik, perusahaan dapat mencegah berbagai praktik tidak etis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik bisnis yang merugikan pihak lain. (Crane *et al.*, 2019) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang etis merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap organisasi bisnis.

Dengan demikian, ruang lingkup etika bisnis mencakup berbagai dimensi moral yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, mulai dari proses pengambilan keputusan, hubungan dengan

pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga tata kelola organisasi yang etis. Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa etika bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

1.2. Nilai Moral dan Prinsip Dasar dalam Dunia Usaha

Nilai moral dan prinsip dasar dalam dunia usaha merupakan fondasi penting dalam penerapan etika bisnis. Nilai moral memberikan pedoman mengenai perilaku yang dianggap benar atau salah dalam aktivitas bisnis, sedangkan prinsip dasar etika bisnis berfungsi sebagai aturan normatif yang membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, penerapan nilai moral dan prinsip etika sangat diperlukan karena kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melibatkan hubungan sosial dengan berbagai pihak seperti konsumen, karyawan, investor, dan masyarakat. Oleh karena itu, etika bisnis berperan dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab (Crane *et al.*, 2019).

Nilai moral dalam dunia usaha mencerminkan standar etis yang harus dimiliki oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nilai moral tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Dalam perspektif etika bisnis modern, nilai moral tidak hanya berkaitan dengan

kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup komitmen terhadap nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap kegiatan usaha (Ferrell *et al.*, 2021).

Salah satu nilai moral utama dalam dunia usaha adalah kejujuran (*honesty*). Kejujuran menjadi dasar dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dengan konsumen, mitra bisnis, maupun masyarakat. Dalam praktik bisnis, kejujuran tercermin melalui penyampaian informasi yang benar mengenai produk atau jasa, transparansi dalam transaksi bisnis, serta tidak melakukan praktik penipuan atau manipulasi. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran cenderung memiliki reputasi yang baik dan mampu mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang dengan para pemangku kepentingan. Kejujuran bahkan dipandang sebagai kunci keberhasilan dan keberlanjutan usaha karena mampu menciptakan hubungan yang saling percaya dan menghindarkan praktik kecurangan dalam bisnis (Ris, 2022).

Selain kejujuran, integritas (*integrity*) juga merupakan nilai moral yang sangat penting dalam dunia usaha. Integritas berkaitan dengan konsistensi antara nilai moral yang dianut dengan tindakan yang dilakukan dalam praktik bisnis. Individu atau organisasi yang memiliki integritas tinggi akan tetap berpegang pada prinsip etika meskipun menghadapi tekanan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak etis. Integritas juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan, dan sesuai dengan norma yang berlaku (Crane *et al.*, 2019).

Nilai moral berikutnya adalah tanggung jawab (*responsibility*). Dalam konteks bisnis, tanggung jawab berarti

bahwa perusahaan dan para pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, termasuk dampaknya terhadap pihak lain. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep ini sering dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) yang menekankan bahwa perusahaan harus memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan (Ferrell *et al.*, 2021).

Selain itu, keadilan (*fairness*) merupakan nilai moral yang penting dalam menjaga hubungan yang harmonis dalam dunia usaha. Prinsip keadilan menuntut perusahaan untuk memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, keadilan dapat diwujudkan melalui pemberian upah yang layak kepada karyawan, perlakuan yang adil terhadap pemasok, serta penetapan harga yang wajar bagi konsumen. Penerapan nilai keadilan dalam bisnis akan membantu menciptakan hubungan kerja yang sehat serta meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Keadilan dalam bisnis juga menjadi dasar dalam menciptakan keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan *stakeholder* sehingga mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Arianto, 2024).

Selain nilai moral, etika bisnis juga didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas usaha. Prinsip-prinsip ini membantu pelaku bisnis dalam menghadapi berbagai dilema etika yang sering muncul dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya prinsip

etika yang jelas, perusahaan dapat menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi konflik antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral (Crane *et al.*, 2019).

Salah satu prinsip dasar dalam dunia usaha adalah prinsip otonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pelaku bisnis memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Kebebasan tersebut harus disertai dengan kesadaran moral sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain. Prinsip otonomi juga menegaskan bahwa setiap individu dalam organisasi harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis. Dalam etika bisnis modern, prinsip otonomi menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan yang etis karena menuntut adanya kebebasan yang disertai tanggung jawab moral dan akuntabilitas terhadap setiap tindakan (Aziz, 2025).

Prinsip berikutnya adalah prinsip kejujuran, yang mengharuskan perusahaan untuk bersikap jujur dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk dalam pemasaran produk, penyusunan laporan keuangan, maupun komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Kejujuran merupakan faktor penting dalam menciptakan hubungan bisnis yang didasarkan pada kepercayaan dan transparansi. Tanpa adanya kejujuran, hubungan bisnis akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang (Ferrell *et al.*, 2021).

Selanjutnya adalah prinsip keadilan, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk menghormati hak-hak para pemangku

kepentingan serta tidak melakukan diskriminasi atau eksploitasi terhadap pihak lain. Dengan menerapkan prinsip keadilan, perusahaan dapat menciptakan hubungan bisnis yang seimbang dan berkelanjutan (Crane *et al.*, 2019).

Prinsip lain yang penting adalah prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan bisnis yang baik harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Perusahaan harus berupaya menciptakan kerja sama yang adil dan saling menguntungkan dengan konsumen, pemasok, maupun mitra usaha. Prinsip ini juga menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan dan kerja sama. Dalam etika bisnis, prinsip saling menguntungkan menjadi dasar dalam menciptakan hubungan yang berkelanjutan karena menekankan keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (Arianto, 2024).

Selain itu, terdapat pula prinsip tanggung jawab sosial, yang menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kepentingan masyarakat secara luas (Ferrell *et al.*, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai moral dan prinsip dasar dalam dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk praktik bisnis yang etis. Nilai moral seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan

keadilan menjadi landasan bagi perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Sementara itu, prinsip dasar etika bisnis memberikan pedoman praktis dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas bisnis sehari-hari sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab (Crane *et al.*, 2019).

1.3. Hubungan Etika, Hukum, dan Tanggung Jawab Sosial

Hubungan antara etika, hukum, dan tanggung jawab sosial merupakan aspek penting dalam praktik bisnis modern. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan perilaku organisasi agar kegiatan bisnis berjalan secara bertanggung jawab. Etika memberikan standar moral mengenai perilaku yang dianggap benar atau salah, hukum menyediakan aturan formal yang mengikat dan memiliki sanksi, sedangkan tanggung jawab sosial menekankan kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, ketiga unsur ini menjadi kerangka penting dalam menciptakan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berintegritas (Crane *et al.*, 2019).

Etika bisnis berkaitan dengan nilai, norma, dan prinsip moral yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Etika tidak selalu tertulis dalam bentuk aturan formal, tetapi berkembang dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks organisasi, etika bisnis membantu perusahaan dalam menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi dilema moral yang tidak selalu diatur secara jelas oleh hukum. Oleh karena itu, etika sering kali menjadi standar yang lebih luas dibandingkan hukum karena mencakup

aspek moral yang tidak selalu tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman normatif yang melengkapi hukum formal dalam mengarahkan perilaku organisasi agar tetap sesuai dengan nilai moral yang berlaku (Firmansyah *et al.*, 2021).

Sementara itu, hukum dalam dunia usaha merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur perilaku individu dan organisasi dalam kegiatan ekonomi. Hukum bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Dalam konteks bisnis, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kegiatan ekonomi, melindungi hak konsumen, serta mencegah praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Dengan adanya regulasi hukum, perusahaan diharapkan menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari tindakan yang melanggar hukum (Ferrell *et al.*, 2021).

Meskipun etika dan hukum memiliki fungsi yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam praktik bisnis. Hukum sering kali disusun berdasarkan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat, sehingga banyak prinsip etika yang kemudian diformalkan menjadi aturan hukum. Namun, tidak semua perilaku yang tidak etis dapat dijangkau oleh hukum. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan standar etika yang lebih luas (Crane *et al.*, 2019).

Selain etika dan hukum, konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) juga memiliki peran penting dalam dunia usaha. Tanggung jawab

sosial mengacu pada komitmen perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya (Carroll & Brown, 2022).

Hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial sangat erat karena tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan penerapan nilai-nilai etika dalam praktik bisnis. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis secara konsisten akan berusaha menjalankan kegiatan usaha yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai program seperti pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial menjadi bentuk nyata dari komitmen moral perusahaan terhadap masyarakat (Ferrell *et al.*, 2021).

Di sisi lain, hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam beberapa kasus, pemerintah menetapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kewajiban hukum. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Dengan adanya regulasi tersebut, tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban hukum bagi perusahaan (Crane *et al.*, 2019).

Dalam praktik bisnis modern, perusahaan yang berhasil biasanya mampu mengintegrasikan etika, hukum, dan tanggung jawab sosial dalam strategi organisasinya. Integrasi tersebut membantu perusahaan dalam membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan yang mematuhi hukum, menjunjung tinggi nilai etika, dan menjalankan tanggung jawab sosial secara konsisten akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Integrasi antara etika, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial juga menjadi faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif serta menjaga keberlangsungan organisasi di era bisnis modern (Aziz, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika, hukum, dan tanggung jawab sosial merupakan tiga elemen penting yang saling berkaitan dalam dunia usaha. Etika memberikan dasar moral bagi perilaku bisnis, hukum menyediakan aturan formal yang mengikat, sedangkan tanggung jawab sosial mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Ketiganya bekerja secara saling melengkapi untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, kepatuhan hukum, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan (Carroll & Brown, 2022).

1.4. Teori-Teori Etika dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Pengambilan keputusan dalam dunia bisnis sering kali melibatkan berbagai pertimbangan moral yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, pemangku kepentingan, serta dampak sosial dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, teori-teori etika digunakan sebagai kerangka konseptual untuk membantu individu maupun organisasi dalam menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi dilema etika. Teori etika memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu keputusan seharusnya diambil berdasarkan nilai moral tertentu sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga aspek keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat (Crane *et al.*, 2019).

Salah satu teori etika yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah teori utilitarianisme. Teori ini menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar secara moral apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks bisnis, utilitarianisme mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil terhadap berbagai pihak yang terlibat, seperti karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan utilitarian, perusahaan berusaha memilih tindakan yang memberikan manfaat sosial terbesar dan meminimalkan dampak negatif bagi pihak lain. Teori ini banyak digunakan dalam etika bisnis modern karena memberikan kerangka analisis berbasis konsekuensi dalam pengambilan keputusan organisasi (Aziz, 2025).

Selain utilitarianisme, terdapat pula teori deontologi yang menekankan pentingnya kewajiban moral dalam menentukan

benar atau salahnya suatu tindakan. Menurut teori ini, suatu tindakan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip moral atau aturan etika tertentu, bukan semata-mata berdasarkan konsekuensinya. Dalam dunia bisnis, pendekatan deontologi menekankan bahwa perusahaan harus bertindak sesuai dengan prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak individu, meskipun tindakan tersebut tidak selalu menghasilkan keuntungan ekonomi terbesar (Ferrell *et al.*, 2021).

Teori etika lainnya yang juga penting dalam pengambilan keputusan bisnis adalah teori hak (*rights theory*). Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi dalam setiap aktivitas bisnis. Dalam praktiknya, perusahaan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak-hak pihak lain, seperti hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, hak karyawan untuk memperoleh perlakuan yang adil, serta hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Dengan demikian, teori hak menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dalam kegiatan bisnis. Teori ini menjadi landasan penting dalam etika bisnis karena menekankan perlindungan hak individu sebagai batas moral dalam setiap pengambilan keputusan organisasi (Arianto, 2024).

Selain teori hak, terdapat pula teori keadilan (*justice theory*) yang menekankan pentingnya distribusi manfaat dan beban secara adil dalam masyarakat. Dalam konteks bisnis, teori ini mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak diskriminatif. Prinsip keadilan dapat diterapkan dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemberian upah

yang layak kepada karyawan, kesempatan kerja yang setara, serta perlakuan yang adil terhadap pemasok dan konsumen. Dengan menerapkan prinsip keadilan, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis dengan para pemangku kepentingan (Crane *et al.*, 2019).

Teori lain yang juga banyak digunakan dalam etika bisnis adalah teori etika kebajikan (*virtue ethics*). Teori ini berfokus pada karakter moral individu yang mengambil keputusan, bukan hanya pada aturan atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam perspektif etika kebajikan, keputusan bisnis yang baik dihasilkan oleh individu yang memiliki karakter moral yang baik, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun budaya perusahaan yang mendorong pengembangan karakter etis bagi para pemimpinnya maupun karyawannya (Ferrell *et al.*, 2021).

Selain teori-teori tersebut, dalam perkembangan etika bisnis modern juga dikenal teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*). Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, perusahaan dapat menciptakan keputusan yang lebih etis dan berkelanjutan (Crane *et al.*, 2019).

Penerapan teori-teori etika dalam pengambilan keputusan bisnis sangat penting karena dunia usaha sering

dihadapkan pada situasi yang kompleks dan penuh dengan dilema moral. Dengan menggunakan berbagai pendekatan teori etika, pelaku bisnis dapat mengevaluasi dampak moral dari setiap pilihan yang tersedia dan memilih tindakan yang paling sesuai dengan nilai-nilai etika. Hal ini tidak hanya membantu perusahaan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik, tetapi juga mendukung terciptanya praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Karyanto, 2024).

Salah satu dampak penting dari penerapan etika bisnis dalam organisasi adalah terbentuknya reputasi perusahaan serta meningkatnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

1.5. Peran Etika dalam Membangun Reputasi dan Kepercayaan Publik

Dalam dunia usaha yang semakin kompetitif dan transparan, perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan kinerja finansialnya, tetapi juga berdasarkan bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara etis. Praktik bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan akan membantu perusahaan membangun citra positif di mata masyarakat. Reputasi yang baik menjadi aset strategis bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, menarik investor, serta memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan (Crane *et al.*, 2019).

Etika bisnis berperan sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha secara bertanggung jawab. Ketika perusahaan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam

pengambilan keputusan dan operasional bisnis, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang adil dan transparan. Komitmen tersebut akan membangun persepsi positif dari masyarakat karena publik cenderung lebih percaya kepada organisasi yang menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis dapat memperkuat legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut (Ferrell *et al.*, 2021).

Pelanggaran etika seperti penipuan, manipulasi informasi, atau praktik bisnis yang tidak adil dapat merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Dalam era digital saat ini, informasi mengenai perilaku perusahaan dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan media massa sehingga reputasi perusahaan menjadi sangat rentan terhadap pelanggaran etika. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan etika bisnis menjadi faktor kunci dalam menjaga citra dan keberlanjutan perusahaan (Alamudi, 2025).

Selain itu, etika bisnis juga berperan penting dalam membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam dunia usaha meliputi konsumen, karyawan, pemasok, investor, pemerintah, dan masyarakat luas. Ketika perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara etis, perusahaan akan lebih mudah menjalin hubungan yang saling percaya dengan berbagai pihak tersebut. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan akan menciptakan kerja sama jangka panjang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun bagi para pemangku kepentingannya (Crane *et al.*, 2019).

Penerapan etika bisnis juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Melalui program tanggung jawab sosial, perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Ketika masyarakat melihat bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial, tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan akan semakin meningkat (Carroll & Brown, 2022).

Selain memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan, penerapan etika bisnis juga dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Konsumen pada umumnya lebih cenderung memilih produk atau layanan dari perusahaan yang memiliki reputasi baik dan menjalankan bisnis secara etis. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis tidak hanya memiliki nilai moral, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang mampu menjaga reputasi etisnya akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam pasar karena mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari konsumen (Ferrell *et al.*, 2021).

Etika bisnis juga berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang positif. Perusahaan yang menanamkan nilai-nilai etika dalam budaya organisasi akan mendorong karyawan untuk bertindak secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Budaya organisasi yang berlandaskan etika akan meningkatkan integritas internal

perusahaan serta mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan bisnis. Dengan demikian, penerapan etika tidak hanya berdampak pada citra eksternal perusahaan, tetapi juga pada kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan (Hartati, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika memiliki peran yang sangat penting dalam membangun reputasi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik dalam dunia usaha. Penerapan etika bisnis membantu perusahaan menciptakan citra positif, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan loyalitas konsumen, serta membangun budaya organisasi yang berintegritas. Dengan demikian, etika bisnis tidak hanya menjadi pedoman moral dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga menjadi faktor strategis yang mendukung keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang (Crane *et al.*, 2019).

RUANG EKSPLORASI

1. “Sebuah perusahaan makanan cepat saji diketahui menggunakan bahan baku yang kualitasnya menurun untuk menekan biaya produksi. Secara hukum tindakan tersebut tidak melanggar regulasi karena masih memenuhi standar minimum keamanan pangan. Namun, beberapa konsumen merasa dirugikan karena kualitas produk menurun tanpa adanya informasi yang jelas dari perusahaan.”

Pertanyaan:

Analisislah kasus tersebut berdasarkan pengertian dan ruang lingkup etika bisnis. Apakah tindakan perusahaan tersebut dapat dianggap etis? Jelaskan alasan Anda dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan kepentingan konsumen.

2. "Seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan dituntut untuk meningkatkan penjualan produk dalam waktu singkat. Ia kemudian mempertimbangkan strategi promosi yang lebih-lebihkan manfaat produk agar menarik minat konsumen."

Pertanyaan:

Menurut Anda, bagaimana seorang manajer seharusnya bertindak berdasarkan nilai moral dan prinsip dasar dalam dunia usaha seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab? Jelaskan keputusan yang paling etis serta alasan moral yang mendasarinya.

3. "Sebuah perusahaan tambang telah memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di suatu daerah. Namun, aktivitas perusahaan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan protes dari masyarakat setempat."

Pertanyaan:

Analisis hubungan antara etika, hukum, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kasus tersebut. Apakah perusahaan sudah bertindak benar hanya karena memiliki izin hukum? Jelaskan bagaimana perusahaan seharusnya

mengambil keputusan yang mempertimbangkan ketiga aspek tersebut."

4. "Sebuah perusahaan teknologi menemukan bahwa salah satu produknya memiliki potensi cacat yang dapat menyebabkan kerugian kecil bagi sebagian pengguna. Menarik produk dari pasar akan menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan."

Pertanyaan:

Gunakan dua teori etika dalam pengambilan keputusan bisnis (misalnya utilitarianisme, deontologi, atau teori keadilan) untuk menganalisis keputusan yang seharusnya diambil oleh perusahaan. Bandingkan kedua pendekatan tersebut dan jelaskan keputusan mana yang menurut Anda paling tepat.

5. Tugas Proyek:

Pilih satu perusahaan nyata yang menurut Anda memiliki reputasi baik atau pernah mengalami krisis reputasi. Kemudian lakukan analisis yang mencakup:

- a. Praktik etika bisnis yang diterapkan atau dilanggar oleh perusahaan tersebut.
- b. Dampak praktik tersebut terhadap kepercayaan publik dan reputasi perusahaan.
- c. Rekomendasi langkah-langkah etis yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.

Laporan proyek ditulis secara sistematis dengan panjang minimal 3–5 halaman dan didukung oleh sumber referensi yang relevan.

Bab 2

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan, seperti manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam praktik bisnis modern, penerapan GCG menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi, integritas, dan keberlanjutan organisasi (Maharani *et al.*, 2024).

Secara konseptual, *Good Corporate Governance* (GCG) mengacu pada seperangkat prinsip, struktur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar beroperasi sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik

memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan secara transparan dan berdasarkan prinsip etika serta peraturan yang berlaku. Dengan demikian, GCG berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu perusahaan dalam mengelola risiko, meningkatkan kinerja organisasi, serta menjaga reputasi perusahaan di mata publik (Solomon, 2020).

Salah satu prinsip utama dalam *Good Corporate Governance* (GCG) adalah transparansi. Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan dan akurat mengenai kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut meliputi laporan keuangan, kebijakan perusahaan, serta keputusan strategis yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Transparansi sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan serta mengurangi potensi terjadinya praktik penyimpangan dalam organisasi (Maharani *et al.*, 2024).

Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban manajemen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan organisasi. Dalam sistem tata kelola yang baik, setiap pihak dalam perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas juga membantu memastikan bahwa manajemen perusahaan menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan perusahaan dan para pemegang saham (Solomon, 2020).

Selain transparansi dan akuntabilitas, *Good Corporate Governance* (GCG) juga menekankan prinsip responsibilitas atau

tanggung jawab. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya (Zahada & Umar, 2024).

Prinsip lain yang penting dalam tata kelola perusahaan adalah *independensi*. *Independensi* menekankan bahwa setiap organ perusahaan, seperti dewan komisaris dan direksi, harus menjalankan tugasnya secara objektif tanpa adanya konflik kepentingan atau tekanan dari pihak tertentu. Dengan adanya *independensi*, keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat lebih objektif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan serta para pemangku kepentingan (Maharani *et al.*, 2024).

Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) juga mencakup prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, perlakuan yang adil terhadap karyawan, serta hubungan yang transparan dan jujur dengan konsumen dan pemasok. Dengan menerapkan prinsip kewajaran, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnisnya (Solomon, 2020).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Salah satu

manfaat utama adalah meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, akses yang lebih mudah terhadap sumber pendanaan, serta tingkat risiko yang lebih rendah. Selain itu, GCG juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel dapat mendorong efisiensi serta pengambilan keputusan yang lebih baik (Desviani *et al.*, 2025).

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi modern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi semakin penting bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usaha. Perusahaan yang mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berpotensi menghadapi berbagai risiko seperti skandal keuangan, konflik kepentingan, serta hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan GCG tidak hanya menjadi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga menjadi tuntutan dari investor, regulator, dan masyarakat luas (Maharani *et al.*, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan para pemangku kepentingannya (Solomon, 2020).

2.1. Pengertian dan Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan sistem yang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perusahaan agar kegiatan operasionalnya berjalan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep ini mencakup hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika serta peraturan yang berlaku sehingga dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan dan para pemangku kepentingannya (Maharani *et al.*, 2024).

Secara konseptual, tata kelola perusahaan dapat dipahami sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem ini mencakup struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta proses pengambilan keputusan yang digunakan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan organisasi (Solomon, 2020).

Selain itu, tata kelola perusahaan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Melalui sistem tata kelola yang baik, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan, seperti laporan keuangan, kebijakan manajemen, serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan serta untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara bertanggung jawab (Maharani *et al.*, 2024).

Salah satu tujuan utama tata kelola perusahaan adalah untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Dalam perusahaan modern, pemegang saham sering kali tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik modal. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, pemegang saham dapat memperoleh jaminan bahwa investasi mereka dikelola secara profesional dan transparan (Mallin, 2016).

Selain melindungi kepentingan pemegang saham, tata kelola perusahaan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem tata kelola yang baik dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki proses pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam organisasi. Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang efektif dapat

memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Sulistiyandari *et al.*, 2023).

Tujuan lain dari tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam dunia usaha tidak hanya terdiri dari pemegang saham, tetapi juga meliputi karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik harus mampu mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak tersebut sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan lingkungannya (Solomon, 2020).

Selain itu, tata kelola perusahaan juga bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik cenderung memiliki citra yang positif di mata masyarakat dan investor. Reputasi yang baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti kemudahan dalam memperoleh investasi, peningkatan loyalitas konsumen, serta hubungan yang lebih baik dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya (Maharani *et al.*, 2024).

Dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi semakin penting bagi keberlanjutan organisasi. Perusahaan yang mampu menerapkan prinsip tata kelola secara efektif akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan bisnis serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi dan regulasi. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan

tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengawasan, tetapi juga sebagai strategi manajemen yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan (Mallin, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam organisasi untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Tujuan utama tata kelola perusahaan adalah melindungi kepentingan pemegang saham, meningkatkan kinerja perusahaan, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan perusahaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (Sulistiyandari *et al.*, 2023).

2.2. Prinsip-Prinsip GCG: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pedoman penting dalam mengelola perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip GCG bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang efektif sehingga mampu melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berfokus pada kinerja ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, prinsip-prinsip GCG menjadi dasar dalam membangun sistem

manajemen perusahaan yang sehat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Maharani *et al.*, 2024).

Prinsip-prinsip GCG umumnya mencakup lima aspek utama, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional serta mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja organisasi, mengurangi risiko penyimpangan, serta memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan (Syofyan, 2021).

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang relevan dan akurat kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan yang menerapkan transparansi akan menyediakan informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan, kebijakan manajemen, serta strategi bisnis yang dijalankan. Transparansi bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Mallin, 2016). Penerapan transparansi dalam tata kelola perusahaan dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

a. Keterbukaan informasi keuangan

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Laporan tersebut

harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan (Solomon, 2020).

- b. Pengungkapan informasi perusahaan secara tepat waktu
Informasi penting mengenai kinerja perusahaan, perubahan kebijakan, serta risiko bisnis harus disampaikan kepada pemangku kepentingan secara tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Maharani *et al.*, 2024).
- c. Transparansi dalam proses pengambilan
Proses pengambilan keputusan dalam perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam organisasi (Syofyan, 2021).

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, struktur, dan tanggung jawab setiap organ dalam perusahaan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi serta meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang (Solomon, 2020). Beberapa aspek penting dalam penerapan prinsip akuntabilitas antara lain:

- a. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab
Setiap organ perusahaan, seperti dewan komisaris, direksi, dan manajemen, harus memiliki peran yang jelas

dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan (Mallin, 2016).

b. Sistem pengawasan yang efektif

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit sangat penting untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi (Syofyan, 2021).

c. Evaluasi kinerja manajemen

Perusahaan perlu melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja manajemen guna memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Maharani *et al.*, 2024).

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta memastikan bahwa setiap tindakan dalam organisasi dilakukan secara bertanggung jawab.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas menekankan bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma sosial yang berlaku. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, prinsip responsibilitas sering dikaitkan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau CSR) (Syofyan, 2021). Beberapa aspek penting dalam prinsip responsibilitas meliputi:

- a. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi
Perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menghindari praktik bisnis yang melanggar hukum (Maharani *et al.*, 2024).
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
Perusahaan perlu menjalankan berbagai program sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan (Solomon, 2020).
- c. Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial
Perusahaan harus memperhatikan dampak kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar (Mallin, 2016).

Melalui penerapan prinsip responsibilitas, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi menekankan bahwa setiap organ perusahaan harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu. Independensi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan didasarkan pada kepentingan organisasi secara keseluruhan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Beberapa aspek penting dalam penerapan prinsip independensi antara lain:

a. Penghindaran konflik kepentingan

Setiap pihak dalam perusahaan harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Maharani *et al.*, 2024).

b. Peran dewan komisaris independen

Keberadaan komisaris independen sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengawasan terhadap manajemen dilakukan secara objektif dan profesional (Mallin, 2016).

c. Pengambilan keputusan yang objektif

Keputusan bisnis harus didasarkan pada kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan secara keseluruhan, bukan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu (Solomon, 2020).

Dengan adanya independensi, perusahaan dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan bahwa perusahaan harus memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara. Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap karyawan, serta hubungan yang jujur dengan konsumen dan pemasok. Dengan menerapkan prinsip kewajaran, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis (Maharani *et al.*, 2024). Beberapa aspek penting dalam prinsip kewajaran antara lain:

a. Perlindungan hak pemegang saham

Perusahaan harus memastikan bahwa semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan (Mallin, 2016).

b. Perlakuan yang adil terhadap karyawan

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang setara kepada karyawan dalam hal pengembangan karier, penghargaan, serta kesejahteraan kerja (Solomon, 2020).

c. Hubungan yang adil dengan mitra bisnis

Perusahaan harus menjalankan hubungan bisnis yang jujur dan transparan dengan pemasok, konsumen, serta mitra bisnis lainnya. Hubungan yang didasarkan pada kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab akan membangun kepercayaan serta menciptakan kerja sama yang berkelanjutan. Transparansi dalam proses bisnis juga membantu mencegah praktik tidak etis seperti penipuan, manipulasi informasi, dan konflik kepentingan sehingga perusahaan dapat menjaga reputasi serta keberlanjutan usahanya (Ferrell *et al.*, 2021).

Dengan menerapkan prinsip kewajaran, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan dasar penting dalam pengelolaan perusahaan yang profesional dan berintegritas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan menerapkan GCG secara konsisten, perusahaan dapat menciptakan tata kelola yang baik serta mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Maharani *et al.*, 2024).

2.3. Struktur Organisasi Tata Kelola: RUPS, Direksi, Komisaris, Komite-Komite Pendukung

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk mengambil keputusan penting terkait arah perusahaan, mengevaluasi kinerja manajemen, serta menentukan kebijakan fundamental yang memengaruhi keberlanjutan perusahaan. Dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), RUPS menjadi mekanisme akuntabilitas direksi dan dewan komisaris kepada pemegang saham atas pengelolaan perusahaan (KNKG, 2021). Beberapa fungsi dan kewenangan RUPS antara lain:

- a. Mengangkat dan memberhentikan direksi serta dewan komisaris

RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa saja yang akan menjalankan fungsi pengurusan (direksi) dan pengawasan (dewan komisaris) dalam perusahaan, serta

memberhentikanannya apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan

RUPS berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajemen melalui laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, serta memberikan pengesahan sebagai bentuk akuntabilitas direksi kepada pemegang saham.

- c. Menetapkan penggunaan laba perusahaan

RUPS berwenang menentukan pembagian laba, seperti dividen kepada pemegang saham maupun alokasi laba ditahan untuk pengembangan perusahaan.

- d. Mengubah anggaran dasar perusahaan

RUPS memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar, termasuk perubahan struktur modal, kegiatan usaha, maupun kebijakan strategis perusahaan.

- e. Memberikan persetujuan atas tindakan korporasi tertentu
Tindakan-tindakan penting seperti merger, akuisisi, konsolidasi, atau penjualan aset dalam jumlah besar harus mendapatkan persetujuan RUPS sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.

- f. Mengawasi jalannya perusahaan secara tidak langsung
Melalui hak suara dan keputusan yang diambil, RUPS berperan dalam memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan nilai-nilai etika bisnis. (Ferrel *et al.*, 2022).

2. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional perusahaan sehari-hari. Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan manajerial guna mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi, misi, serta strategi bisnis yang telah ditetapkan. Dalam sistem GCG, direksi memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan perusahaan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Agoes & Ardana, 2019). Adapun tugas dan tanggung jawab direksi meliputi:

- a. Mengelola kegiatan operasional perusahaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas bisnis.
- b. Menyusun strategi dan rencana bisnis perusahaan untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.
- c. Menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada RUPS.
- d. Mengelola sumber daya perusahaan, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun aset perusahaan secara efektif.
- e. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan etika bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha. (Agoes & Ardana, 2019).

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi utama melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang

dilakukan oleh direksi. Selain melakukan pengawasan, dewan komisaris juga memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi agar pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif, transparan, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (KNKG, 2021). Tugas dan fungsi dewan komisaris antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja direksi dalam mengelola perusahaan.
- b. Memberikan nasihat strategis kepada direksi terkait pengembangan dan keberlanjutan perusahaan.
- c. Memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas perusahaan.
- d. Menilai laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sebelum disampaikan kepada RUPS.
- e. Membentuk serta mengawasi komite-komite pendukung, seperti komite audit dan komite nominasi serta remunerasi. (KNKG, 2021).

4. Komite-Komitanya Pendukung

Komite pendukung merupakan struktur tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif. Komite-komite ini bertugas melakukan kajian mendalam terhadap bidang tertentu, seperti pengawasan laporan keuangan, manajemen risiko, serta kebijakan sumber daya manusia di tingkat manajemen puncak (KNKG, 2021). Beberapa komite yang umum terdapat dalam struktur tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan

disusun secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Komite ini juga berperan dalam mengawasi proses audit internal dan audit eksternal perusahaan (Agoes & Ardana, 2019). Tugas komite audit antara lain:

- 1) Menelaah laporan keuangan perusahaan sebelum dipublikasikan untuk memastikan keandalan informasi keuangan.
- 2) Memantau pelaksanaan audit internal dan audit eksternal guna menjaga integritas proses audit.
- 3) Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dalam mencegah kesalahan maupun kecurangan.
- 4) Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. (Agoes & Ardana, 2019).

b. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite nominasi dan remunerasi bertugas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai proses pemilihan, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi bagi direksi dan komisaris. Komite ini bertujuan memastikan bahwa posisi kepemimpinan perusahaan diisi oleh individu yang kompeten dan memiliki integritas tinggi (KNKG, 2021). Tugas komite nominasi dan remunerasi meliputi:

- 1) Menyusun kriteria pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris berdasarkan kompetensi dan integritas.

- 2) Melakukan evaluasi kinerja direksi dan komisaris secara berkala untuk memastikan efektivitas kepemimpinan perusahaan.
- 3) Memberikan rekomendasi terkait sistem remunerasi yang adil, transparan, dan kompetitif.
- 4) Mendukung penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam kebijakan kompensasi manajemen puncak. (KNKG, 2021).

c. Komite Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko bertugas membantu dewan komisaris dalam mengawasi implementasi sistem manajemen risiko perusahaan. Komite ini memastikan bahwa perusahaan memiliki mekanisme identifikasi, evaluasi, serta mitigasi risiko yang memadai untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (KNKG, 2021). Fungsi komite manajemen risiko antara lain:

- 1) Mengidentifikasi berbagai potensi risiko perusahaan, baik risiko operasional, keuangan, maupun strategis.
- 2) Mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan risiko perusahaan secara berkala.
- 3) Memantau implementasi manajemen risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terkait pengendalian risiko strategis perusahaan. (KNKG, 2021).

2.4. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Internal

Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, serta tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini bertujuan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, memastikan keandalan pelaporan keuangan, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pencegahan terhadap kesalahan, penyimpangan, maupun kecurangan dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi (Arens *et al.*, 2017).

Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan dan pengendalian internal diawali dengan pembentukan lingkungan pengendalian yang menjadi fondasi utama bagi seluruh sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan komitmen pimpinan organisasi terhadap integritas, etika, serta penerapan tata kelola yang baik. Lingkungan ini meliputi struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas, serta adanya kebijakan dan prosedur yang mengatur perilaku kerja. Lingkungan pengendalian yang kuat akan menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi kepatuhan dan tanggung jawab sehingga seluruh anggota organisasi terdorong untuk bekerja secara profesional dan sesuai standar yang telah ditetapkan (Romney & Steinbart, 2020).

Selanjutnya, mekanisme pengawasan internal juga melibatkan proses penilaian risiko yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis berbagai faktor yang dapat menimbulkan kesalahan dalam operasional maupun pelaporan keuangan, termasuk risiko kecurangan, kesalahan administrasi, maupun ketidaksesuaian terhadap regulasi. Melalui proses ini, organisasi dapat menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk meminimalkan dampak risiko serta memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan secara aman dan terkendali. Dalam kerangka pengendalian internal modern, penilaian risiko merupakan salah satu komponen utama yang terintegrasi dengan aktivitas pengendalian dan monitoring untuk mendukung efektivitas tata kelola organisasi (Munifah, 2023).

Mekanisme pengendalian internal juga diwujudkan melalui penerapan aktivitas pengendalian yang merupakan kebijakan dan prosedur konkret yang dirancang untuk memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan secara efektif. Aktivitas ini meliputi berbagai bentuk pengawasan seperti otorisasi transaksi, pemisahan tugas antarpegawai, verifikasi dokumen, rekonsiliasi data, serta pengamanan aset organisasi. Dengan adanya aktivitas pengendalian tersebut, organisasi dapat meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun kesalahan dalam proses operasional sehingga kualitas pengelolaan organisasi dapat terjaga dengan baik (Arens *et al.*, 2017).

Selain itu, mekanisme pengawasan internal juga sangat bergantung pada sistem informasi dan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Sistem ini memungkinkan setiap informasi yang relevan dapat dikumpulkan, diolah, dan disampaikan secara tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan. Komunikasi yang baik antar unit kerja akan memudahkan proses pengawasan karena setiap pihak memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengendalian. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh manajemen dapat didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Romney & Steinbart, 2020).

Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal juga mencakup kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian yang telah diterapkan. Pemantauan dapat dilakukan melalui audit internal, evaluasi kinerja, maupun peninjauan berkala terhadap prosedur kerja yang ada. Proses ini penting untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tetap berjalan secara optimal serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan organisasi maupun perkembangan regulasi yang berlaku. Melalui pemantauan yang konsisten, organisasi dapat segera mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian dan melakukan perbaikan secara tepat waktu.

Dengan demikian, mekanisme pengawasan dan pengendalian internal merupakan komponen penting dalam tata kelola organisasi yang bertujuan untuk menjaga integritas operasional, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini tidak hanya berfungsi

sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan (Arens *et al.*, 2017).

2.5. Peran GCG dalam Meningkatkan Kinerja dan Keberlanjutan Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya dalam suatu perusahaan. Penerapan GCG bertujuan untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang karena keputusan bisnis diambil secara profesional dan berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Agoes & Ardana, 2019).

Salah satu peran utama GCG dalam meningkatkan kinerja perusahaan adalah mendorong transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Transparansi memungkinkan perusahaan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Keterbukaan informasi ini meningkatkan kepercayaan investor, mempermudah proses pengawasan, serta mendorong manajemen untuk bekerja lebih profesional dalam mencapai target kinerja perusahaan. Dengan demikian, transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi

operasional dan kualitas pengambilan keputusan manajerial (OECD, 2023).

Selain itu, GCG juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas manajemen perusahaan. Melalui mekanisme tata kelola yang baik, setiap organ perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan, sementara dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja direksi. Sistem akuntabilitas ini menciptakan mekanisme kontrol yang efektif sehingga setiap keputusan bisnis dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemegang saham, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan (KNKG, 2021).

Peran penting lainnya dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, perusahaan memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola berbagai risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional. Pengelolaan risiko yang efektif membantu perusahaan menghindari kerugian finansial, mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan, serta menjaga stabilitas operasional perusahaan. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Adam *et al.*, 2025).

GCG juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan investor dan akses terhadap sumber pendanaan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik cenderung memiliki reputasi yang lebih positif di mata investor, kreditur, dan pasar

keuangan. Kepercayaan tersebut membuat perusahaan lebih mudah memperoleh investasi maupun sumber pembiayaan untuk mendukung ekspansi usaha dan inovasi bisnis. Dengan adanya dukungan pendanaan yang memadai, perusahaan dapat mengembangkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar (OECD, 2023).

Selain meningkatkan kinerja ekonomi, penerapan GCG juga berperan dalam mendorong keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*). Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Hal ini mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, seperti penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, GCG membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan (Adam *et al.*, 2025).

Secara keseluruhan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal yang kuat, serta pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan dapat menciptakan sistem manajemen yang lebih profesional dan terpercaya. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta memastikan keberlangsungan

perusahaan dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks (Agoes & Ardana, 2019).

RUANG EKSPLORASI

1. “Sebuah perusahaan keluarga berkembang pesat dan mulai menarik investor eksternal. Namun, dalam pengambilan keputusan strategis, pemilik perusahaan masih mendominasi seluruh keputusan tanpa melibatkan manajemen profesional atau mempertimbangkan kepentingan pemegang saham lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari investor mengenai transparansi dan perlindungan terhadap hak pemegang saham.”

Pertanyaan:

Analisis kasus tersebut berdasarkan pengertian dan tujuan **tata kelola perusahaan** (*Good Corporate Governance*). Mengapa **penerapan tata kelola** perusahaan yang baik penting bagi perusahaan yang sedang berkembang dan memiliki banyak pemegang saham?

2. “Sebuah perusahaan publik mengalami skandal karena laporan keuangannya dimanipulasi oleh manajemen untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa manajemen tidak memberikan informasi yang lengkap kepada pemegang saham dan dewan komisaris.”

Pertanyaan:

Berdasarkan kasus tersebut, identifikasi prinsip-prinsip GCG yang dilanggar (transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan kewajaran). Jelaskan bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip tersebut dapat memengaruhi kepercayaan investor dan reputasi perusahaan.

3. “Dalam sebuah perusahaan, dewan direksi sering mengambil keputusan besar tanpa konsultasi dengan dewan komisaris. Selain itu, komite audit tidak aktif menjalankan fungsinya dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan.”

Pertanyaan:

Jelaskan bagaimana struktur organisasi tata kelola perusahaan yang ideal seharusnya berjalan, khususnya terkait peran RUPS, direksi, komisaris, dan komite-komite pendukung. Analisis dampak yang dapat terjadi apabila salah satu unsur tersebut tidak menjalankan fungsinya secara efektif.

4. “Sebuah perusahaan manufaktur mengalami kerugian besar akibat adanya kecurangan internal yang dilakukan oleh beberapa karyawan di bagian keuangan. Investigasi menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai serta kurangnya pengawasan dari manajemen.”

Pertanyaan:

Analisis bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian internal seharusnya diterapkan dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jelaskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan

manajemen untuk memperkuat sistem pengawasan perusahaan.

5. Tugas Proyek:

Pilih satu perusahaan nasional atau internasional yang dikenal menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Kemudian lakukan analisis yang mencakup:

- a. Bentuk penerapan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan tersebut.
- b. Pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan dan kepercayaan investor.
- c. Peran GCG dalam mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Laporan proyek disusun secara sistematis dengan panjang minimal 3–5 halaman dan didukung oleh referensi ilmiah yang relevan.

Bab 3

Sinergi Etika dan Tata Kelola dalam Dunia Bisnis

Sinergi antara etika bisnis dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan faktor penting dalam menciptakan organisasi yang berintegritas, transparan, dan berkelanjutan. Etika bisnis berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis, sedangkan tata kelola perusahaan menyediakan kerangka struktural yang mengatur proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta pertanggungjawaban manajemen. Ketika kedua aspek ini berjalan secara terpadu, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya secara profesional sekaligus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (Agoes & Ardana, 2019).

Salah satu bentuk sinergi antara etika dan tata kelola bisnis terlihat dalam penerapan prinsip integritas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Etika bisnis menuntut agar setiap keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam

kerangka tata kelola perusahaan, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan keberlanjutan organisasi (Kamandanu, 2025).

Sinergi etika dan tata kelola juga tercermin dalam pembentukan budaya organisasi yang etis. Tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya mengatur struktur organisasi dan mekanisme pengawasan, tetapi juga mendorong terciptanya budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai moral dan profesionalisme. Budaya etis ini dibangun melalui kepemimpinan yang memberikan teladan, penerapan kode etik perusahaan, serta sistem pengendalian internal yang mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan standar etika dalam setiap aktivitas bisnis (OECD, 2023).

Selain itu, sinergi antara etika dan tata kelola perusahaan berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan. Dalam sistem tata kelola perusahaan, tuntutan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pelaporan yang transparan, pengawasan oleh dewan komisaris, serta audit internal dan eksternal yang memastikan bahwa laporan

keuangan dan aktivitas perusahaan disampaikan secara akurat dan dapat dipercaya (KNKG, 2021).

Sinergi ini juga penting dalam mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau penyalahgunaan wewenang. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam sistem tata kelola, perusahaan dapat membangun mekanisme pengawasan yang mampu mengidentifikasi dan mencegah tindakan seperti korupsi, konflik kepentingan, manipulasi laporan keuangan, maupun praktik bisnis yang merugikan pemangku kepentingan. Penerapan kode etik, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta pengawasan yang efektif menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas perusahaan (Kamandanu, 2025).

Di sisi lain, sinergi antara etika bisnis dan tata kelola perusahaan juga berkontribusi terhadap pembangunan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Perusahaan yang menerapkan standar etika tinggi serta sistem tata kelola yang baik cenderung memiliki reputasi yang lebih kuat di mata investor, pelanggan, dan masyarakat. Reputasi yang baik tersebut dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Agoes & Ardana, 2019).

Secara keseluruhan, sinergi antara etika dan tata kelola perusahaan merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Etika memberikan arah moral bagi perilaku organisasi, sementara tata kelola perusahaan menyediakan mekanisme struktural untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan secara

konsisten dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Dengan integrasi yang kuat antara etika dan tata kelola, perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan usaha di masa depan (OECD, 2023).

3.1. Hubungan dan Keselarasan antara Etika dan Tata Kelola

Hubungan antara etika dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan aspek *fundamental* dalam menciptakan sistem bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Etika bisnis memberikan landasan nilai moral yang mengarahkan perilaku individu dan organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis, sedangkan tata kelola perusahaan menyediakan kerangka struktural dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keselarasan antara kedua aspek ini sangat penting karena tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada komitmen etis dari para pelaku bisnis dalam menjalankan tanggung jawabnya (Agoes & Ardana, 2019).

1. Etika sebagai Landasan Nilai dalam Tata Kelola Perusahaan

Etika berperan sebagai fondasi moral yang membentuk prinsip dan perilaku dalam sistem tata kelola perusahaan. Tanpa adanya nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, mekanisme tata kelola yang ada berpotensi menjadi sekadar aturan formal tanpa implementasi yang efektif. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik harus

didukung oleh budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan nilai moral dalam setiap aktivitas bisnis. Beberapa aspek yang menunjukkan peran etika sebagai landasan tata kelola antara lain:

- a. Menjadi pedoman perilaku bagi manajemen dan karyawan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Etika berfungsi sebagai panduan dalam menentukan standar perilaku yang harus dijalankan oleh manajemen dan karyawan. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab membantu memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan dampak moral serta kepentingan pihak lain yang terlibat dalam aktivitas perusahaan. Dengan demikian, etika membantu menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan dapat dipercaya (Agoes & Ardana, 2019).
- b. Mendorong terciptanya budaya organisasi yang berintegritas. Etika berkontribusi dalam membangun budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab. Budaya organisasi yang beretika akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan nilai moral yang disepakati bersama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kesadaran moral individu dalam organisasi (OECD, 2023).
- c. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Dalam organisasi bisnis, pengambilan keputusan sering kali melibatkan berbagai kepentingan

yang berbeda. Etika berperan sebagai mekanisme pengendali moral yang membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, serta konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya nilai etika yang kuat, keputusan bisnis diharapkan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab (Kamandanu, 2025).

- d. Menjadi dasar dalam penyusunan kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan merupakan salah satu instrumen penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik berisi prinsip, norma, dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Penyusunan kode etik yang berlandaskan nilai-nilai etika membantu perusahaan menciptakan pedoman perilaku yang jelas, sehingga dapat meminimalkan potensi pelanggaran serta memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab (KNKG, 2021).

2. Tata Kelola sebagai Mekanisme Implementasi Etika

Jika etika memberikan arah moral, maka tata kelola perusahaan berfungsi sebagai sistem yang memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik bisnis. Tata kelola perusahaan menyediakan struktur organisasi, prosedur pengawasan, serta mekanisme pengendalian yang membantu perusahaan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku (OECD, 2023). Beberapa bentuk implementasi etika melalui tata kelola perusahaan meliputi:

- a. Pembentukan struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi yang jelas merupakan salah satu elemen

penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Struktur ini mencakup pembagian peran dan tanggung jawab antara berbagai organ perusahaan, seperti direksi, dewan komisaris, serta komite-komite pendukung seperti komite audit dan komite risiko. Kejelasan struktur organisasi membantu menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat sehingga setiap keputusan dan tindakan dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada para pemangku kepentingan (KNKG, 2021).

- b. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, serta standar etika yang telah ditetapkan. Pengendalian internal membantu mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, maupun penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga keandalan informasi keuangan perusahaan. Melalui sistem pengendalian yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mematuhi peraturan yang berlaku (Sudarmanto *et al.*, 2024)
- c. Pelaksanaan audit internal dan eksternal. Audit merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Audit internal dilakukan oleh unit khusus dalam organisasi untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal

serta kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Sementara itu, audit eksternal dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Melalui proses audit ini, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan bersifat akurat, transparan, dan dapat dipercaya (Agoes & Ardana, 2019).

- d. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). *Whistleblowing system* merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada karyawan maupun pihak lain untuk melaporkan tindakan yang tidak etis, ilegal, atau melanggar kebijakan perusahaan tanpa takut mengalami tekanan atau pembalasan. Sistem ini menjadi salah satu sarana penting dalam menjaga integritas organisasi karena memungkinkan perusahaan mendeteksi dan menangani pelanggaran etika secara lebih dini. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang efektif, perusahaan dapat memperkuat budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab (OECD, 2023).

3. Keselarasan Etika dan Tata Kelola dalam Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Keselarasan antara etika dan tata kelola perusahaan berperan penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti investor, pelanggan, karyawan, serta masyarakat. Ketika perusahaan mampu menunjukkan komitmen terhadap nilai etika sekaligus menerapkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, maka tingkat kepercayaan terhadap perusahaan akan

meningkat. Kepercayaan tersebut menjadi aset penting bagi perusahaan dalam mempertahankan reputasi serta memperkuat posisi kompetitif di pasar (Agoes & Ardana, 2019). Beberapa bentuk kontribusi keselarasan etika dan tata kelola terhadap kepercayaan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Meningkatkan transparansi informasi perusahaan. Penerapan etika bisnis yang didukung oleh sistem tata kelola yang baik mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Transparansi informasi, terutama terkait dengan laporan keuangan, kinerja perusahaan, serta kebijakan manajemen, membantu menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mengurangi potensi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (OECD, 2023).
- b. Keselarasan antara etika dan tata kelola perusahaan juga mendorong terciptanya sistem akuntabilitas yang kuat dalam organisasi. Dalam sistem ini, setiap keputusan yang diambil oleh manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan kepada pemegang saham maupun pihak lain yang berkepentingan. Akuntabilitas yang baik membantu memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mempertimbangkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip akuntabilitas menuntut agar

direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas keputusan manajerial serta kinerja perusahaan yang dilaporkan kepada para pemangku kepentingan secara terbuka dan tepat waktu (Solomon, 2020).

- c. Menciptakan reputasi perusahaan yang positif. Perusahaan yang konsisten menjalankan praktik bisnis yang etis serta menerapkan tata kelola yang baik akan memperoleh reputasi yang positif di mata publik. Reputasi tersebut merupakan hasil dari persepsi masyarakat bahwa perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Reputasi yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor, tetapi juga dapat menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan dari para pesaingnya (Agoes & Ardana, 2019).
- d. Memperkuat hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Keselarasan antara etika dan tata kelola perusahaan juga membantu memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Ketika perusahaan mampu menjaga integritas, transparansi, serta tanggung jawab sosialnya, maka para pemangku kepentingan akan merasa lebih percaya dan bersedia menjalin kerja sama yang berkelanjutan dengan perusahaan. Hubungan jangka panjang ini sangat penting dalam mendukung stabilitas bisnis serta memastikan keberlanjutan perusahaan di masa depan (KNKG, 2021).

4. Keselarasan Etika dan Tata Kelola dalam Mencegah Praktik Bisnis Tidak Etis

Keselarasannya antara etika dan tata kelola juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap berbagai praktik bisnis yang tidak etis, seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan wewenang. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam sistem tata kelola perusahaan, organisasi dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dalam mendeteksi serta mencegah potensi pelanggaran. Beberapa mekanisme pencegahan yang dihasilkan dari keselarasan tersebut antara lain:

- a. Penerapan kode etik dan pedoman perilaku perusahaan. Kode etik perusahaan merupakan dokumen yang berisi prinsip, nilai, dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Kode etik berfungsi sebagai panduan dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai etika perusahaan. Dengan adanya pedoman perilaku yang jelas, karyawan dan manajemen memiliki acuan dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan dilema etika dalam aktivitas bisnis (KNKG, 2021).
- b. Sistem pengawasan yang kuat dari dewan komisaris dan komite audit. Dalam sistem tata kelola perusahaan, dewan komisaris dan komite audit memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan serta kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang efektif membantu memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip tata kelola

yang baik serta mematuhi standar etika yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang kuat juga dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sehingga dapat segera ditangani secara tepat (Agoes & Ardana, 2019).

- c. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Manajemen risiko dan sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kinerja organisasi. Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan, baik yang berkaitan dengan aspek operasional, keuangan, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya praktik bisnis yang tidak etis dalam kegiatan operasionalnya (OECD, 2023).
- d. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika. Penegakan sanksi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik atau kebijakan perusahaan mendapatkan konsekuensi yang jelas. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menciptakan efek jera serta mendorong seluruh anggota organisasi untuk mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Selain itu, penegakan sanksi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan kredibilitas organisasi di mata para pemangku kepentingan. Dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik, mekanisme penegakan aturan dan kode etik merupakan bagian penting untuk memastikan

bahwa nilai-nilai etika benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak hanya menjadi pedoman tertulis semata (Rossouw, 2020).

5. Keselarasan Etika dan Tata Kelola dalam Mendukung Keberlanjutan Perusahaan

Integrasi antara etika dan tata kelola perusahaan juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan. Perusahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam sistem tata kelola cenderung lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Hal ini mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan (OECD, 2023). Beberapa kontribusi keselarasan etika dan tata kelola terhadap keberlanjutan perusahaan antara lain:

- a. Mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Perusahaan yang menerapkan nilai-nilai etika dalam tata kelola organisasi akan lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan selain mencapai keuntungan

ekonomi, sehingga praktik bisnis harus memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari aktivitas perusahaan (Purwatiningsih, 2022).

- b. Menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Keselarasan antara etika dan tata kelola perusahaan membantu organisasi dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan serta dampak sosial dari aktivitas bisnisnya. Pendekatan ini membantu perusahaan menciptakan nilai jangka panjang yang lebih luas bagi masyarakat (Agoes & Ardana, 2019).
- c. Meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan etika dan tata kelola yang baik dapat meningkatkan stabilitas organisasi dengan memperkuat sistem pengawasan, pengendalian risiko, serta akuntabilitas manajemen. Hal ini membantu perusahaan menghindari berbagai praktik bisnis yang merugikan serta meningkatkan kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan kinerja yang berkelanjutan dalam jangka panjang (KNKG, 2021).
- d. Memperkuat legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan regulator. Perusahaan yang menjalankan praktik bisnis secara etis serta menerapkan tata kelola yang baik akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat dan regulator. Legitimasi tersebut tercermin

dalam tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan, dukungan dari pemerintah, serta penerimaan masyarakat terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Dengan adanya legitimasi yang kuat, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih stabil dan berkelanjutan (OECD, 2023).

3.2. Etika sebagai Fondasi Moral bagi Tata Kelola yang Efektif

Etika memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi moral dalam penerapan tata kelola perusahaan yang efektif. Dalam dunia bisnis, etika berfungsi sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan dan menjalankan aktivitas usaha. Tanpa adanya landasan etika yang kuat, sistem tata kelola perusahaan hanya akan menjadi kerangka formal yang tidak mampu menjamin perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika dalam tata kelola perusahaan diperlukan agar setiap kebijakan dan tindakan organisasi didasarkan pada prinsip kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan (Agoes & Ardana, 2019).

Etika memberikan arah moral bagi para pemimpin dan manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan organisasi. Dalam praktik tata kelola perusahaan, etika membantu memastikan bahwa setiap keputusan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pemangku kepentingan serta kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, nilai-nilai etika

menjadi pedoman dalam membangun praktik manajemen yang bertanggung jawab dan transparan, yang merupakan unsur penting dalam sistem tata kelola perusahaan yang efektif. Penerapan etika dalam tata kelola perusahaan juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang bertujuan menciptakan kepercayaan serta integritas dalam pengelolaan perusahaan (Kamandanu, 2025).

Selain itu, etika berperan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Budaya organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai etika akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ketika nilai etika telah tertanam dalam budaya perusahaan, maka kepatuhan terhadap kebijakan dan mekanisme tata kelola tidak hanya didorong oleh aturan formal, tetapi juga oleh kesadaran moral individu dalam organisasi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam perusahaan (OECD, 2023).

Etika juga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting karena hubungan antara perusahaan dengan investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh reputasi etis perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan aktivitas bisnis secara etis dan transparan, maka tingkat kepercayaan pemangku kepentingan akan meningkat.

Kepercayaan tersebut dapat memperkuat legitimasi perusahaan serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang (KNKG, 2021).

Di samping itu, etika juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam organisasi, seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem tata kelola perusahaan, nilai-nilai etika diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan pedoman perilaku, seperti kode etik perusahaan, sistem pengendalian internal, serta mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Melalui penerapan prinsip etika yang konsisten, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas serta meminimalkan potensi terjadinya perilaku tidak etis dalam aktivitas bisnis. Penerapan sistem etika organisasi dan pengendalian internal tersebut merupakan bagian penting dari praktik *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mencegah terjadinya kecurangan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan (Purwatiningsih, 2022).

Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai fondasi moral yang mendukung keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang efektif. Nilai-nilai etika memberikan arah dan batasan bagi perilaku organisasi, sehingga setiap keputusan dan tindakan perusahaan dapat dilakukan secara bertanggung jawab serta sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Integrasi antara etika dan tata kelola perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat reputasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan

perusahaan dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks (Agoes & Ardana, 2019).

3.3. Penerapan Nilai-Nilai Etis dalam Praktik *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan nilai-nilai etis merupakan elemen penting dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG) karena etika menjadi dasar moral yang mengarahkan perilaku organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nilai-nilai etis seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan serta menjalankan operasional bisnis secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam kerangka GCG, penerapan etika tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tata kelola yang memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan (Agoes & Ardana, 2019).

Dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG), nilai-nilai etis diwujudkan melalui pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Budaya organisasi yang berlandaskan etika mendorong seluruh anggota perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan, untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar moral dan peraturan yang berlaku. Kepemimpinan yang beretika memiliki peran penting dalam membentuk budaya tersebut karena pemimpin menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai etika dalam budaya organisasi akan memperkuat efektivitas sistem tata kelola perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para

pemangku kepentingan terhadap organisasi (Badawi & Hartati, 2024).

Penerapan nilai-nilai etis dalam praktik GCG juga tercermin dalam penyusunan dan penerapan kode etik perusahaan. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur standar etika bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dokumen ini biasanya memuat prinsip-prinsip dasar seperti larangan konflik kepentingan, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, serta komitmen terhadap kepatuhan hukum dan praktik bisnis yang adil. Dengan adanya kode etik yang jelas dan diterapkan secara konsisten, perusahaan dapat menciptakan sistem tata kelola yang lebih transparan dan berintegritas (KNKG, 2021).

Selain itu, nilai-nilai etis dalam GCG juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal membantu perusahaan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan, standar etika, serta regulasi yang berlaku. Melalui sistem pengawasan yang baik, perusahaan dapat mencegah terjadinya penyimpangan seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang. Penerapan pengawasan yang berlandaskan nilai etika juga memperkuat akuntabilitas manajemen dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2023).

Penerapan nilai-nilai etis dalam praktik GCG juga berperan dalam membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks

tata kelola perusahaan, nilai etika menuntut perusahaan untuk memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan menghormati hak-hak mereka. Hal ini mencakup keterbukaan informasi kepada investor, perlindungan terhadap hak karyawan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat reputasi perusahaan di pasar (Badawi & Hartati, 2024).

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai etis dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Nilai-nilai etika tidak hanya menjadi pedoman perilaku bagi individu dalam organisasi, tetapi juga menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan, mekanisme pengawasan, serta hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan. Dengan mengintegrasikan etika dalam setiap aspek tata kelola perusahaan, organisasi dapat meningkatkan integritas, transparansi, serta kepercayaan publik yang pada akhirnya mendukung keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Agoes & Ardana, 2019).

3.4. Contoh Kasus Pelanggaran Etika dan Dampaknya terhadap Governance

Pelanggaran etika dalam dunia bisnis merupakan salah satu faktor yang dapat merusak sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Ketika nilai-nilai etika seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab tidak diterapkan secara konsisten, maka mekanisme pengawasan dan pengendalian

dalam perusahaan menjadi tidak efektif. Pelanggaran etika biasanya muncul dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang oleh manajemen. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjaga standar etika dapat berdampak serius terhadap stabilitas organisasi, reputasi perusahaan, serta kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis dan sistem pengendalian yang kuat menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas tata kelola perusahaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam aktivitas bisnis (Kamandanu, 2025).

Salah satu contoh kasus pelanggaran etika yang sering dijadikan pembelajaran dalam tata kelola perusahaan adalah skandal manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di dunia. Dalam banyak kasus, manipulasi laporan keuangan dilakukan oleh manajemen untuk menampilkan kinerja perusahaan yang tampak lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Praktik tersebut tidak hanya melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal serta kegagalan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif (OECD, 2023). Beberapa aspek penting yang dapat dipahami dari studi kasus pelanggaran etika dan dampaknya terhadap tata kelola perusahaan antara lain sebagai berikut.

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika dalam Perusahaan

Pelanggaran etika dalam perusahaan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku individu maupun kelemahan dalam sistem tata kelola.

Pelanggaran tersebut biasanya terjadi ketika individu dalam organisasi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes & Ardana, 2019). Beberapa bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi dalam perusahaan meliputi:

- a. Manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Praktik ini dilakukan dengan cara memalsukan, mengubah, atau menyajikan data keuangan secara tidak benar untuk memberikan gambaran kinerja perusahaan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Manipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan untuk menarik investor, meningkatkan harga saham perusahaan, atau menyembunyikan kerugian perusahaan. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pemangku kepentingan serta merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip etika bisnis dan pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan dalam praktik tata kelola perusahaan (Purwatiningsih, 2022).
- b. Konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan terjadi ketika individu dalam organisasi berada dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau kepentingan pihak tertentu dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Misalnya,

seorang manajer memilih pemasok yang dimiliki oleh kerabatnya tanpa mempertimbangkan kualitas atau harga yang lebih kompetitif dari pemasok lain. Konflik kepentingan dapat merusak integritas proses pengambilan keputusan serta menimbulkan ketidakadilan dalam organisasi (OECD, 2023).

- c. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pelanggaran etika yang terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contohnya termasuk menerima suap, melakukan penggelapan dana perusahaan, atau menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak budaya organisasi serta menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Agoes & Ardana, 2019).
- d. Pelanggaran terhadap kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menerima suap, melakukan diskriminasi terhadap karyawan, menyalahgunakan informasi rahasia perusahaan, atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelanggaran terhadap kode etik menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dianut oleh

perusahaan dengan perilaku individu dalam organisasi (KNKG, 2021).

2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika dalam perusahaan umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan budaya organisasi, sistem pengawasan, maupun perilaku individu dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat melemahkan sistem tata kelola perusahaan sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Beberapa faktor penyebab pelanggaran etika antara lain:

- a. Budaya organisasi yang tidak menekankan nilai integritas. Budaya organisasi yang tidak menempatkan integritas sebagai nilai utama dapat mendorong munculnya perilaku yang tidak etis dalam lingkungan kerja. Apabila perusahaan lebih menekankan pencapaian target bisnis tanpa memperhatikan proses yang etis, maka karyawan cenderung mengabaikan prinsip moral dalam menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme sebagai pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi (Agoes & Ardana, 2019).
- b. Lemahnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang lemah dapat mempermudah terjadinya penyimpangan dalam aktivitas perusahaan. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, tindakan kecurangan atau manipulasi dapat sulit dideteksi sejak dini. Sistem pengendalian internal yang efektif

seharusnya mampu memastikan bahwa setiap aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, serta standar etika yang telah ditetapkan (OECD, 2023).

- c. Pengawasan yang tidak efektif dari dewan komisaris dan komite audit. Dalam sistem tata kelola perusahaan, dewan komisaris dan komite audit memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan serta aktivitas manajemen. Apabila fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan secara efektif, maka praktik manajemen yang tidak etis dapat terjadi tanpa adanya kontrol yang memadai. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan menjadi salah satu elemen penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam organisasi (KNKG, 2021).
- d. Tekanan untuk mencapai target kinerja atau keuntungan yang tinggi. Tekanan yang berlebihan untuk mencapai target kinerja atau keuntungan tertentu dapat mendorong manajemen maupun karyawan untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis. Dalam kondisi tertentu, individu dalam organisasi mungkin melakukan manipulasi data, menyembunyikan informasi penting, atau mengambil keputusan yang tidak transparan demi memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem penilaian kinerja tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan proses yang sesuai dengan prinsip etika bisnis. Penerapan sistem manajemen yang menyeimbangkan pencapaian kinerja dengan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika sangat penting

untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis dalam organisasi (Badawi & Hartati, 2024).

3. Dampak Pelanggaran Etika terhadap Tata Kelola Perusahaan

Pelanggaran etika dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Ketika praktik tidak etis terjadi, maka prinsip-prinsip dasar GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi terganggu. Hal ini dapat melemahkan struktur pengawasan serta menurunkan efektivitas pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2023). Beberapa dampak utama pelanggaran etika terhadap tata kelola perusahaan meliputi:

- a. Menurunnya kepercayaan pemegang saham dan investor.
Salah satu dampak paling signifikan dari pelanggaran etika adalah menurunnya tingkat kepercayaan dari pemegang saham dan investor. Ketika perusahaan dianggap tidak transparan atau tidak jujur dalam menyampaikan informasi, investor akan merasa ragu terhadap integritas manajemen perusahaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya serta berdampak pada menurunnya nilai saham perusahaan di pasar. Kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan, sehingga pelanggaran etika dapat merusak reputasi perusahaan dan melemahkan hubungan dengan para pemangku kepentingan (Badawi & Hartati, 2024).

- b. Rusaknya reputasi perusahaan di mata publik. Reputasi perusahaan merupakan aset penting yang dibangun melalui kepercayaan dan persepsi positif dari masyarakat. Pelanggaran etika dapat merusak reputasi tersebut karena perusahaan dipandang tidak menjalankan kegiatan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Reputasi yang buruk dapat memengaruhi hubungan perusahaan dengan pelanggan, mitra bisnis, maupun masyarakat, serta menurunkan daya saing perusahaan di pasar (Agoes & Ardana, 2019).
- c. Munculnya sanksi hukum dan regulasi. Pelanggaran etika dalam beberapa kasus juga dapat berujung pada pelanggaran hukum. Perusahaan yang terbukti melakukan praktik tidak etis seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi, atau pelanggaran regulasi dapat dikenakan berbagai sanksi hukum, seperti denda, pembatasan kegiatan operasional, hingga tuntutan hukum terhadap manajemen perusahaan. Konsekuensi hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar serta memengaruhi keberlanjutan perusahaan (KNKG, 2021).
- d. Melemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal. Pelanggaran etika juga dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Ketika sistem tata kelola tidak mampu mencegah atau mendeteksi pelanggaran secara efektif, maka perusahaan menjadi lebih rentan terhadap berbagai risiko operasional, keuangan, maupun reputasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan

dan pengendalian internal agar dapat memperkuat penerapan tata kelola yang baik (OECD, 2023).

4. Pembelajaran bagi Penerapan *Good Corporate Governance*

Kasus pelanggaran etika memberikan pelajaran penting bagi perusahaan dalam memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan perlu memastikan bahwa nilai-nilai etika tidak hanya menjadi prinsip tertulis, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam budaya organisasi dan sistem pengawasan perusahaan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran etika dalam perusahaan antara lain:

- a. Memperkuat penerapan kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan merupakan pedoman perilaku yang mengatur standar etika bagi seluruh anggota organisasi. Penerapan kode etik yang efektif membantu memastikan bahwa setiap karyawan memahami nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan serta mengetahui batasan perilaku yang dapat diterima dalam aktivitas bisnis. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai acuan dalam menghadapi dilema etika yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional perusahaan (Agoes & Ardana, 2019).
- b. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian internal. Sistem pengawasan dan pengendalian internal merupakan elemen penting dalam menjaga integritas organisasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara efektif melalui peran aktif dewan komisaris, komite

audit, serta unit audit internal. Pengawasan yang kuat membantu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini serta memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku (KNKG, 2021).

- c. Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). *Whistleblowing system* merupakan salah satu mekanisme penting dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sistem ini memberikan sarana bagi karyawan maupun pihak lain untuk melaporkan tindakan yang tidak etis atau melanggar kebijakan perusahaan tanpa takut mengalami tekanan atau pembalasan. Dengan adanya sistem pelaporan yang transparan dan terlindungi, perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi serta menangani pelanggaran etika yang terjadi dalam organisasi (OECD, 2023).
- d. Membangun budaya organisasi yang berintegritas. Budaya organisasi yang berintegritas merupakan fondasi penting dalam mencegah pelanggaran etika. Budaya ini dapat dibangun melalui komitmen pimpinan perusahaan dalam memberikan teladan perilaku yang etis serta konsisten dalam menerapkan nilai-nilai integritas dalam setiap keputusan bisnis. Kepemimpinan yang beretika akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, serta profesionalisme dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan etika, perusahaan dapat menciptakan

lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Badawi & Hartati, 2024).

3.5. Model Integrasi Etika dan Tata Kelola dalam Organisasi Modern

Model integrasi etika dan tata kelola dalam organisasi modern merupakan pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai etika bisnis dengan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Integrasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan aktivitas operasional organisasi tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga didasarkan pada prinsip moral seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam organisasi modern yang menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks, integrasi etika dan tata kelola menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis dalam sistem tata kelola perusahaan dipandang sebagai strategi penting untuk menciptakan organisasi yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan (Kamandanu, 2025). Berikut beberapa aspek utama dalam model integrasi etika dan tata kelola dalam organisasi modern.

1. Integrasi Nilai Etika dalam Struktur Tata Kelola

Integrasi etika dalam struktur tata kelola organisasi dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai moral ke dalam sistem pengelolaan perusahaan, termasuk dalam struktur organisasi, kebijakan perusahaan, serta mekanisme pengawasan. Nilai-nilai

etika menjadi pedoman bagi dewan direksi, dewan komisaris, serta manajemen dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Dengan memasukkan prinsip etika dalam struktur tata kelola, organisasi dapat memastikan bahwa setiap keputusan strategis mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, serta kepentingan para pemangku kepentingan (Agoes & Ardana, 2019). Beberapa bentuk integrasi nilai etika dalam struktur tata kelola meliputi:

- a. Penerapan prinsip integritas dalam pengambilan keputusan manajemen. Integritas merupakan salah satu nilai etika yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan, manajemen diharapkan mempertimbangkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepentingan jangka panjang organisasi. Dengan menerapkan prinsip integritas, perusahaan dapat menghindari keputusan yang bersifat oportunistik atau hanya menguntungkan pihak tertentu dalam jangka pendek. Penerapan integritas dalam pengambilan keputusan juga menjadi bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik karena mendorong manajemen untuk bertindak secara transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (Siwiyanti, 2024).
- b. Keterlibatan dewan komisaris dalam pengawasan aspek etika perusahaan. Dewan komisaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip etika dan tata kelola yang baik. Selain melakukan

pengawasan terhadap kinerja manajemen, dewan komisaris juga bertanggung jawab dalam memantau kepatuhan perusahaan terhadap kode etik serta memastikan bahwa kebijakan perusahaan sejalan dengan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab (KNKG, 2021).

- c. Pembentukan komite etika atau komite kepatuhan. Untuk memperkuat implementasi nilai etika dalam organisasi, beberapa perusahaan membentuk komite khusus seperti komite etika atau komite kepatuhan. Komite ini bertugas mengawasi penerapan nilai-nilai etika dalam kegiatan operasional perusahaan, memberikan rekomendasi kebijakan terkait etika bisnis, serta menangani berbagai isu yang berkaitan dengan pelanggaran etika dalam organisasi (OECD, 2023).
- d. Integrasi prinsip etika dalam kebijakan perusahaan. Nilai-nilai etika juga perlu diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan perusahaan, seperti kebijakan anti-korupsi, anti-suap, pengelolaan konflik kepentingan, serta perlindungan terhadap pelapor pelanggaran. Kebijakan-kebijakan tersebut membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dilakukan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Agoes & Ardana, 2019).

2. Penerapan Kode Etik sebagai Instrumen Tata Kelola

Kode etik merupakan salah satu instrumen utama dalam mengintegrasikan etika dengan tata kelola organisasi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur standar etika bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dokumen ini biasanya memuat prinsip-prinsip

seperti kejujuran, profesionalisme, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepatuhan hukum dan praktik bisnis yang adil. Dalam organisasi modern, kode etik menjadi bagian penting dari sistem tata kelola karena membantu memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan (KNKG, 2021). Penerapan kode etik dalam tata kelola organisasi meliputi beberapa aspek berikut:

- a. Penyusunan pedoman perilaku yang jelas bagi seluruh karyawan. Kode etik perusahaan harus disusun secara sistematis dan jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pedoman ini mencakup standar perilaku dalam berbagai aspek kegiatan perusahaan, seperti hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, pemasok, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya pedoman perilaku yang jelas, karyawan dapat memahami batasan etika yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Agoes & Ardana, 2019).
- b. Sosialisasi dan pelatihan etika bisnis. Agar kode etik dapat diterapkan secara efektif, perusahaan perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan etika bisnis kepada seluruh anggota organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai nilai-nilai etika perusahaan serta memberikan panduan dalam menghadapi berbagai dilema etika yang mungkin muncul dalam aktivitas bisnis. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, perusahaan dapat memperkuat kesadaran etika dalam lingkungan kerja (OECD, 2023).

- c. Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kode etik. Penerapan kode etik juga memerlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa standar etika yang telah ditetapkan benar-benar dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme audit internal, evaluasi kepatuhan, serta pemantauan terhadap perilaku organisasi. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, perusahaan dapat mendeteksi potensi pelanggaran etika sejak dini dan mengambil tindakan yang diperlukan (Kamandanu, 2025).
- d. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Untuk menjaga konsistensi penerapan kode etik, perusahaan perlu menetapkan sanksi yang jelas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Pemberian sanksi yang tegas dan adil dapat menciptakan efek jera serta menunjukkan komitmen perusahaan dalam menegakkan standar etika organisasi. Selain itu, penerapan sanksi juga membantu menjaga kredibilitas sistem tata kelola perusahaan serta memperkuat budaya organisasi yang berintegritas (KNKG, 2021).

3. Integrasi Etika dalam Sistem Pengendalian dan Pengawasan

Model integrasi etika dan tata kelola juga menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai etika dalam sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan organisasi. Sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi untuk memastikan efisiensi operasional dan keandalan laporan keuangan, tetapi juga untuk menjaga kepatuhan terhadap

standar etika dan peraturan yang berlaku. Dengan mengintegrasikan etika dalam sistem pengendalian, organisasi dapat mencegah terjadinya penyimpangan seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang (OECD, 2023). Beberapa bentuk integrasi etika dalam sistem pengendalian dan pengawasan meliputi:

- a. Penerapan sistem audit internal yang memantau kepatuhan terhadap standar etika perusahaan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pengendalian perusahaan. Melalui audit internal, perusahaan dapat mengevaluasi apakah kegiatan operasional dan kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan standar etika serta peraturan yang berlaku. Selain itu, audit internal juga membantu mendeteksi potensi pelanggaran etika sejak dini sehingga perusahaan dapat mengambil langkah korektif secara tepat. Dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG), fungsi audit internal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip etika dan sistem pengendalian yang telah ditetapkan (Purwatiningsih, 2022).
- b. Pembentukan komite audit yang mengawasi transparansi laporan keuangan dan praktik bisnis perusahaan. Komite audit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara transparan dan akurat. Selain itu, komite audit juga bertugas mengawasi praktik bisnis perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan standar etika

yang berlaku. Keberadaan komite audit membantu memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam pengelolaan perusahaan (KNKG, 2021).

- c. Penerapan sistem manajemen risiko yang mempertimbangkan risiko etika. Sistem manajemen risiko dalam perusahaan tidak hanya berfokus pada risiko finansial atau operasional, tetapi juga perlu mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan pelanggaran etika. Dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko etika dalam kegiatan operasional, perusahaan dapat mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi (Agoes & Ardana, 2019).
- d. Penyediaan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). *Whistleblowing system* merupakan salah satu mekanisme penting dalam mendukung penerapan etika dan tata kelola perusahaan. Sistem ini memberikan kesempatan kepada karyawan maupun pihak lain untuk melaporkan tindakan yang tidak etis atau melanggar kebijakan perusahaan secara aman dan transparan. Dengan adanya sistem pelaporan yang efektif, perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi pelanggaran serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas organisasi (OECD, 2023).

4. Integrasi Etika dalam Budaya Organisasi

Integrasi etika dan tata kelola juga sangat bergantung pada pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Budaya organisasi yang

berlandaskan etika mendorong seluruh anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dalam organisasi modern, budaya etis tidak hanya dibentuk melalui aturan formal, tetapi juga melalui kepemimpinan yang memberikan teladan serta sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten. Beberapa bentuk integrasi etika dalam budaya organisasi antara lain:

- a. Kepemimpinan yang mencontohkan perilaku etis dalam pengambilan keputusan organisasi. Pemimpin organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya etika dalam perusahaan. Melalui perilaku dan keputusan yang mencerminkan integritas serta tanggung jawab, pemimpin dapat memberikan teladan kepada seluruh anggota organisasi mengenai pentingnya menjalankan aktivitas bisnis secara etis. Keteladanan ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk mematuhi nilai-nilai etika perusahaan (Agoes & Ardana, 2019).
- b. Penanaman nilai integritas dan tanggung jawab dalam budaya kerja perusahaan. Budaya organisasi yang beretika juga dapat dibangun melalui penanaman nilai integritas dan tanggung jawab dalam setiap aspek kegiatan perusahaan. Nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan melalui berbagai program organisasi, seperti pelatihan etika bisnis, komunikasi internal, serta pengembangan budaya kerja yang menekankan pentingnya kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas (OECD, 2023).

- c. Penghargaan terhadap perilaku etis dalam organisasi. Pemberian penghargaan terhadap perilaku yang mencerminkan nilai etika dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong karyawan mematuhi standar etika perusahaan. Sistem penghargaan ini menunjukkan bahwa perusahaan menghargai integritas dan tanggung jawab sebagai bagian penting dari kinerja karyawan. Dengan demikian, karyawan akan lebih termotivasi untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip etika organisasi (KNKG, 2021).
- d. Kebijakan perusahaan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dapat mencakup berbagai aspek, seperti keterbukaan informasi, pengawasan terhadap pengambilan keputusan manajemen, serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dijalankan secara bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip etika dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan konsisten dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas, perusahaan dapat memperkuat budaya organisasi yang berlandaskan nilai etika serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan (Agoes & Ardana, 2022).

5. Integrasi Etika dalam Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Dalam organisasi modern, integrasi etika dan tata kelola juga tercermin dalam cara perusahaan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perusahaan yang

mengintegrasikan nilai etika dalam tata kelola akan berusaha memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan transparan. Hal ini mencakup keterbukaan informasi kepada investor, perlindungan terhadap hak karyawan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (OECD, 2023). Beberapa bentuk integrasi etika dalam hubungan dengan pemangku kepentingan meliputi:

- a. Transparansi informasi kepada pemegang saham dan investor. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik akan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada para pemegang saham dan investor. Transparansi informasi, terutama terkait dengan laporan keuangan, kinerja perusahaan, serta strategi bisnis, membantu para investor memahami kondisi perusahaan secara objektif. Hal ini juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung terciptanya hubungan yang lebih terbuka antara perusahaan dan pemilik modal. Dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), transparansi merupakan salah satu unsur utama yang menekankan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih rasional dan akuntabel (Suryanti, 2025).
- b. Perlindungan terhadap hak karyawan serta penciptaan lingkungan kerja yang adil dan aman. Integrasi etika dalam tata kelola perusahaan juga tercermin dalam perlindungan terhadap hak-hak karyawan. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan diperlakukan secara

adil, mendapatkan kesempatan yang setara dalam pengembangan karier, serta bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perlindungan terhadap hak karyawan tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai etika, tetapi juga membantu meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja (Agoes & Ardana, 2019).

- c. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk implementasi etika dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Melalui program CSR, perusahaan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan. Pelaksanaan CSR menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tempat perusahaan beroperasi (KNKG, 2021).
- d. Pengelolaan hubungan bisnis yang adil dengan mitra dan pemasok. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa hubungan bisnis dengan mitra dan pemasok dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, profesionalisme, dan saling menghormati. Praktik bisnis yang adil mencakup proses pemilihan pemasok yang transparan, penghormatan terhadap kontrak kerja sama, serta penghindaran praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan menerapkan prinsip etika dalam hubungan bisnis, perusahaan dapat

membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan para mitra usaha (OECD, 2023).

RUANG EKSPLORASI

1. “Sebuah perusahaan multinasional telah memiliki sistem tata kelola perusahaan yang lengkap, termasuk dewan komisaris, komite audit, serta berbagai prosedur pengawasan. Namun, dalam praktiknya beberapa manajer senior masih melakukan tindakan yang tidak etis seperti konflik kepentingan dalam pemilihan pemasok.”

Pertanyaan:

Analisis kasus tersebut dengan menjelaskan hubungan dan keselarasan antara etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Mengapa keberadaan struktur tata kelola saja belum tentu menjamin praktik bisnis yang etis?

2. “Dalam sebuah organisasi, pimpinan perusahaan memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya kerja dan perilaku karyawan. Apabila pimpinan tidak menunjukkan perilaku yang etis, maka sistem tata kelola yang telah disusun sering kali tidak berjalan dengan baik.”

Pertanyaan:

Menurut pandangan Anda, bagaimana etika kepemimpinan dapat menjadi fondasi moral bagi tata kelola perusahaan yang efektif? Jelaskan dengan memberikan contoh konkret bagaimana perilaku pemimpin dapat memengaruhi implementasi tata kelola di organisasi.

3. “Sebuah perusahaan teknologi sedang menyusun kebijakan baru terkait transparansi laporan keuangan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran

(*whistleblower*). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan.”

Pertanyaan:

Analisis bagaimana nilai-nilai etis seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan dapat diintegrasikan dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Jelaskan juga manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten.

4. “Sebuah perusahaan besar mengalami skandal karena direksi diketahui memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Setelah skandal tersebut terungkap, kepercayaan investor menurun drastis dan nilai saham perusahaan jatuh.”

Pertanyaan:

Analisis dampak pelanggaran etika tersebut terhadap sistem tata kelola perusahaan (*governance*). Jelaskan bagaimana pelanggaran etika dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan efektivitas mekanisme pengawasan organisasi.

5. Tugas Proyek:

Rancanglah model integrasi antara etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi modern. Model tersebut minimal mencakup:

- a. Prinsip nilai etika yang menjadi dasar organisasi.

- b. Mekanisme tata kelola yang mendukung penerapan nilai etika.
- c. Peran pimpinan dan budaya organisasi dalam menjaga integritas.
- d. Sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai etika.

Hasil proyek disusun dalam bentuk laporan analisis atau presentasi konseptual dengan penjelasan yang sistematis.

Bab 4

Membangun Bisnis yang Berkelanjutan (*Sustainability*)

Membangun bisnis yang berkelanjutan (*sustainability*) merupakan pendekatan strategis yang menekankan keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan dalam kegiatan bisnis. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk mempertahankan kinerja dan memberikan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Dalam konteks bisnis modern, keberlanjutan menjadi elemen penting karena perusahaan dituntut untuk menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, serta generasi mendatang (Elkington, 2020).

Bisnis yang berkelanjutan mengharuskan perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi dan kebijakan organisasi. Integrasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai konsep *triple bottom line*, yang menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan tiga dimensi utama, yaitu keuntungan ekonomi (*profit*), kesejahteraan sosial (*people*), dan kelestarian lingkungan (*planet*). Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat menciptakan nilai yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Elkington, 2020).

Selain itu, pembangunan bisnis yang berkelanjutan juga berkaitan erat dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta praktik bisnis yang etis. Perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan biasanya menerapkan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Hal ini penting karena keberlanjutan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola risiko, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku (OECD, 2023).

Dalam praktiknya, bisnis yang berkelanjutan juga menuntut perusahaan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan energi secara efisien, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta mengurangi risiko yang

berkaitan dengan regulasi lingkungan di masa depan (Schaltegger *et al.*, 2022).

Selain aspek lingkungan, keberlanjutan bisnis juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan. Perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan berupaya menciptakan hubungan yang harmonis dengan karyawan, pelanggan, komunitas lokal, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Hal ini dapat diwujudkan melalui praktik ketenagakerjaan yang adil, perlindungan hak karyawan, kontribusi terhadap pembangunan masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Dengan memperhatikan aspek sosial tersebut, perusahaan dapat memperkuat legitimasi dan reputasinya di mata masyarakat (Carroll & Brown, 2022).

Pada akhirnya, membangun bisnis yang berkelanjutan memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari pemangku kepentingan, serta kemampuan yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Selain itu, pendekatan keberlanjutan juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan produk, proses produksi, serta model bisnis yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab moral perusahaan, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang

penting untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan (Schaltegger *et al.*, 2022).

4.1. Konsep Keberlanjutan dalam Konteks Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) dalam dunia bisnis dan pembangunan modern mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, keberlanjutan sering dijelaskan melalui pendekatan triple bottom line, yaitu integrasi tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini mendorong organisasi dan perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial serta kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas yang dilakukan (Elkington, 2020). Berikut penjelasan konsep keberlanjutan dalam tiga dimensi utama tersebut.

1. Keberlanjutan dalam Aspek Ekonomi

Keberlanjutan dalam aspek ekonomi berkaitan dengan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan ekonomi tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas keuangan, efisiensi operasional, serta keberlangsungan usaha di masa depan. Dengan pendekatan ini, perusahaan berusaha

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya (Schaltegger *et al.*, 2022). Beberapa aspek penting dalam keberlanjutan ekonomi meliputi:

- a. Penciptaan nilai ekonomi jangka panjang, melalui strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi (Schaltegger *et al.*, 2022).
- b. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan produksi tanpa menimbulkan pemborosan yang merugikan organisasi (Elkington, 2020).
- c. Stabilitas dan ketahanan ekonomi perusahaan, yang memungkinkan organisasi bertahan dalam menghadapi perubahan pasar dan tantangan global (Carroll & Brown, 2022).
- d. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja dan dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal (OECD, 2023).

2. Keberlanjutan dalam Aspek Sosial

Keberlanjutan sosial menekankan pentingnya peran perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga hubungan yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan operasionalnya memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan (Carroll &

Brown, 2022). Beberapa aspek penting dalam keberlanjutan sosial antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak karyawan, termasuk pemberian upah yang layak, keselamatan kerja, serta kesempatan yang adil dalam pengembangan karier (OECD, 2023).
- b. Kontribusi terhadap pembangunan masyarakat, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) (Carroll & Brown, 2022).
- c. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan bisnis dengan mitra dan pemasok (Schaltegger *et al.*, 2022).
- d. Penciptaan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, seperti pelanggan, komunitas lokal, dan pemerintah (Elkington, 2020).

3. Keberlanjutan dalam Aspek Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan upaya untuk menjaga kelestarian alam dan meminimalkan dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan. Dalam konteks bisnis, perusahaan dituntut untuk menjalankan kegiatan operasional yang ramah lingkungan serta mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Hal ini penting karena aktivitas industri sering kali memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik (Schaltegger *et al.*, 2022). Beberapa aspek penting dalam keberlanjutan lingkungan meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi mendatang (Elkington, 2020).

- b. Pengurangan emisi dan polusi lingkungan, melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan dan proses produksi yang lebih efisien (OECD, 2023).
- c. Pengelolaan limbah dan daur ulang, guna mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan (Schaltegger *et al.*, 2022).
- d. Pengembangan produk dan proses produksi yang berkelanjutan, yang meminimalkan penggunaan bahan berbahaya serta meningkatkan efisiensi energi (Carroll & Brown, 2022).

4.2. Peran Etika dan Tata Kelola dalam Menciptakan Bisnis Berkelanjutan

Etika dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business*). Keberlanjutan bisnis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, etika memberikan landasan moral bagi perilaku organisasi, sedangkan tata kelola perusahaan menyediakan kerangka struktural yang memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan dalam sistem pengelolaan perusahaan secara efektif. Integrasi antara etika dan tata kelola membantu perusahaan menjalankan aktivitas bisnis secara transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan etika bisnis yang didukung oleh praktik *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kepercayaan

pemangku kepentingan, memperkuat reputasi perusahaan, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Siwiyanti, 2024). Berikut beberapa aspek penting mengenai peran etika dan tata kelola dalam menciptakan bisnis berkelanjutan.

1. Mendorong Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab

Etika bisnis berperan dalam membimbing manajemen perusahaan agar setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nilai-nilai etika seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab membantu manajemen menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Dalam kerangka tata kelola perusahaan, nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (Agoes & Ardana, 2019). Beberapa bentuk penerapan dalam aspek ini antara lain:

- a. Pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, bukan hanya keuntungan ekonomi perusahaan (Carroll & Brown, 2022).
- b. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam strategi bisnis, sehingga perusahaan dapat mengelola risiko secara lebih efektif (Kamandanu, 2025).
- c. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika bisnis, guna menjaga integritas perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis (OECD, 2023).

- d. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami dasar kebijakan perusahaan (KNKG, 2021).

2. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan

Tata kelola perusahaan yang baik menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Transparansi memungkinkan perusahaan menyampaikan informasi yang akurat dan terbuka kepada pemangku kepentingan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa manajemen dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Ketika transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara konsisten, perusahaan dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan investor, pelanggan, serta masyarakat, yang merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis (OECD, 2023). Beberapa implementasi transparansi dan akuntabilitas antara lain:

- a. Pelaporan kinerja perusahaan secara terbuka, termasuk laporan keuangan dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) (Kamandanu, 2025).
- b. Pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris dan komite audit, untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan secara bertanggung jawab (KNKG, 2021).
- c. Penerapan sistem pengendalian internal, guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar etika perusahaan (Agoes & Ardana, 2019).
- d. Audit internal dan eksternal secara berkala, untuk meningkatkan kredibilitas informasi perusahaan (OECD, 2023).

3. Mendorong Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab terhadap Lingkungan

Etika dan tata kelola perusahaan juga berperan dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam konteks keberlanjutan, perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui sistem tata kelola yang baik, perusahaan dapat menetapkan kebijakan lingkungan yang jelas serta mengawasi implementasinya dalam kegiatan operasional (Schaltegger *et al.*, 2022). Beberapa bentuk penerapan dalam aspek ini meliputi:

- a. Penggunaan sumber daya secara efisien, guna mengurangi pemborosan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Elkington, 2020).
- b. Pengurangan emisi dan limbah industri, melalui penerapan teknologi ramah lingkungan (Schaltegger *et al.*, 2022).
- c. Penerapan kebijakan lingkungan dalam operasional perusahaan, seperti standar produksi yang lebih ramah lingkungan (OECD, 2023).
- d. Pengembangan produk dan layanan yang berkelanjutan, yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (Elkington, 2020).

4. Membangun Hubungan yang Berkelanjutan dengan Pemangku Kepentingan

Keberlanjutan bisnis sangat dipengaruhi oleh hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti karyawan, pelanggan, investor, pemasok, serta

masyarakat. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan menghormati hak-hak mereka. Sementara itu, tata kelola perusahaan memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Carroll & Brown, 2022). Beberapa bentuk implementasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak karyawan, termasuk keselamatan kerja dan kesempatan pengembangan karier (OECD, 2023).
- b. Penyediaan produk dan layanan yang berkualitas bagi pelanggan, dengan memperhatikan aspek keamanan dan tanggung jawab sosial (Carroll & Brown, 2022).
- c. Hubungan bisnis yang adil dengan mitra dan pemasok, berdasarkan prinsip kejujuran dan profesionalisme (Kamandanu, 2025).
- d. Keterlibatan perusahaan dalam pembangunan masyarakat, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (KNKG, 2021).

5. Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan terhadap Perusahaan

Integrasi etika dan tata kelola perusahaan yang baik juga memberikan dampak positif terhadap reputasi perusahaan. Reputasi yang baik merupakan aset penting dalam bisnis modern karena memengaruhi tingkat kepercayaan investor, loyalitas pelanggan, serta hubungan dengan masyarakat. Perusahaan yang dikenal memiliki integritas tinggi dan tata kelola yang baik cenderung lebih dipercaya oleh para pemangku

kepentingan, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dapat meningkatkan citra positif perusahaan serta memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap organisasi (Karsono, 2023). Beberapa dampak positif yang dihasilkan antara lain:

- a. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap perusahaan, sehingga mempermudah akses terhadap sumber pendanaan (OECD, 2023).
- b. Penguatan reputasi perusahaan di pasar, yang dapat meningkatkan daya saing bisnis (Agoes & Ardana, 2019).
- c. Peningkatan loyalitas pelanggan, karena perusahaan dianggap menjalankan bisnis secara bertanggung jawab (Carroll & Brown, 2022).
- d. Stabilitas operasional perusahaan dalam jangka panjang, karena didukung oleh hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan (Karsono, 2023).

4.3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Manifestasi Etika Korporasi

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk nyata penerapan etika dalam dunia bisnis yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar kepentingan ekonomi semata. CSR dipahami sebagai kebijakan dan praktik perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta meminimalkan dampak negatif dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Dalam

konteks etika korporasi, CSR mencerminkan kesadaran moral perusahaan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan (Carroll & Brown, 2022).

Sebagai manifestasi etika korporasi, CSR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan CSR menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya dalam menjalankan bisnis yang etis dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Elkington, 2020).

CSR juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang menerapkan CSR tidak hanya berusaha memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berupaya melampaui standar minimum tersebut dengan mengambil inisiatif untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Praktik ini dapat diwujudkan melalui berbagai program sosial, seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan, serta pengembangan ekonomi lokal. Dengan menjalankan CSR secara konsisten, perusahaan dapat memperkuat legitimasi sosialnya

serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat (Carroll & Brown, 2022).

Selain itu, CSR juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam strategi bisnis perusahaan. Dalam organisasi modern, CSR tidak lagi dipandang sebagai kegiatan filantropi semata, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang mengintegrasikan CSR dalam kebijakan dan operasionalnya akan lebih mampu mengelola risiko sosial dan lingkungan, meningkatkan reputasi perusahaan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan CSR tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi keberlangsungan perusahaan (OECD, 2023).

Penerapan CSR sebagai manifestasi etika korporasi juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pada tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan menempatkan nilai-nilai etika sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas bisnis, maka seluruh anggota organisasi akan terdorong untuk berperilaku secara bertanggung jawab dan memperhatikan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Budaya organisasi yang berlandaskan etika ini akan memperkuat komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Siwiyanti, 2024).

4.4. ESG (*Environmental, Social, Governance*) sebagai Indikator Bisnis Berkelanjutan

ESG (*Environmental, Social, Governance*) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. ESG menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, serta kualitas tata kelola organisasi. Dalam dunia bisnis modern, ESG semakin menjadi perhatian investor, regulator, dan masyarakat karena mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan serta pengelolaan risiko jangka panjang (OECD, 2023).

Pendekatan ESG membantu perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan operasional. Dengan mengukur kinerja perusahaan berdasarkan tiga dimensi utama—lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*)—organisasi dapat menunjukkan tanggung jawabnya terhadap berbagai pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, ESG sering digunakan sebagai indikator penting dalam menilai keberlanjutan perusahaan di tingkat global (Schaltegger, Hansen, & Lüdeke-Freund, 2022). Berikut adalah aspek-aspek utama dalam kerangka ESG sebagai indikator bisnis berkelanjutan.

1. *Environmental* (Lingkungan)

Aspek lingkungan dalam ESG berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dampak aktivitas bisnisnya terhadap lingkungan alam. Perusahaan diharapkan menjalankan operasional yang ramah lingkungan serta mengelola sumber

daya alam secara bertanggung jawab untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Dalam konteks bisnis berkelanjutan, pengelolaan lingkungan yang baik juga dapat membantu perusahaan mengurangi risiko operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (Elkington, 2020). Beberapa indikator utama dalam aspek lingkungan antara lain:

- a. Pengelolaan emisi karbon dan polusi lingkungan. Perusahaan diharapkan memiliki kebijakan dan strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta meminimalkan polusi yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, serta peningkatan efisiensi proses produksi. Pengelolaan emisi yang baik membantu perusahaan berkontribusi dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim serta menjaga kualitas lingkungan hidup (OECD, 2023).
- b. Penggunaan energi secara efisien. Efisiensi energi menjadi salah satu indikator penting dalam aspek lingkungan ESG. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi energi melalui penggunaan teknologi hemat energi, optimalisasi proses produksi, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau biomassa. Upaya ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan (Schaltegger *et al.*, 2022).
- c. Pengelolaan limbah dan daur ulang. Aktivitas produksi dalam perusahaan sering menghasilkan limbah yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak

dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, termasuk pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan serta penerapan program daur ulang. Pengelolaan limbah yang baik membantu meminimalkan dampak lingkungan serta mendukung praktik produksi yang lebih berkelanjutan (Elkington, 2020).

- d. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam, seperti air, energi, dan bahan baku produksi, dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bertujuan untuk menjaga ketersediaan sumber daya tersebut bagi generasi mendatang serta mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Praktik ini menjadi bagian penting dari strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan (OECD, 2023).

2. *Social (Sosial)*

Aspek sosial dalam ESG berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, pelanggan, serta masyarakat secara luas. Dimensi ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan hubungan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam praktik bisnis modern, perhatian terhadap aspek sosial menjadi penting karena perusahaan beroperasi dalam lingkungan sosial yang memengaruhi keberlangsungan usahanya (Carroll & Brown, 2022). Beberapa indikator utama dalam aspek sosial meliputi:

- a. Perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan diharapkan memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hal ini mencakup penerapan standar keselamatan kerja, pemberian upah yang layak, serta penyediaan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kariernya. Perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan tidak hanya mencerminkan komitmen etika perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan loyalitas tenaga kerja (OECD, 2023).
- b. Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), seperti pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan sosial lainnya. Melalui kegiatan CSR, perusahaan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya (Carroll & Brown, 2022).
- c. Perlindungan terhadap konsumen. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen aman, berkualitas, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan terhadap konsumen mencakup kejujuran dalam pemasaran, transparansi informasi produk, serta

tanggung jawab perusahaan dalam menangani keluhan atau masalah yang dialami pelanggan. Praktik bisnis yang memperhatikan kepentingan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memperkuat reputasi perusahaan di pasar (Schaltegger *et al.*, 2022).

- d. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam operasional bisnis modern, perusahaan juga diharapkan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia baik dalam kegiatan operasional internal maupun dalam rantai pasok (*supply chain*). Hal ini mencakup larangan terhadap praktik diskriminasi, kerja paksa, serta eksploitasi tenaga kerja. Dengan menghormati hak asasi manusia, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan bisnisnya berjalan sesuai dengan standar etika global serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan (OECD, 2023).

3. **Governance (Tata Kelola)**

Aspek tata kelola dalam ESG berkaitan dengan bagaimana perusahaan dikelola dan diawasi agar dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Tata kelola yang baik sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara profesional dan bebas dari praktik yang tidak etis seperti korupsi, konflik kepentingan, maupun manipulasi laporan keuangan (Maharani *et al.*, 2024). Beberapa indikator utama dalam aspek tata kelola meliputi:

- a. Struktur tata kelola perusahaan yang jelas. Struktur tata kelola perusahaan mencakup pembagian peran dan tanggung jawab antara berbagai organ perusahaan,

seperti dewan direksi, dewan komisaris, serta komite-komite pendukung seperti komite audit dan komite risiko. Struktur yang jelas membantu memastikan bahwa fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan berjalan secara efektif. Dewan direksi bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan, sedangkan dewan komisaris berperan dalam mengawasi kinerja manajemen serta memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (OECD, 2023).

- b. **Transparansi dalam pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan.** Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan perlu menyajikan laporan keuangan dan informasi kinerja secara jelas, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Transparansi informasi memungkinkan pemegang saham dan investor memahami kondisi perusahaan secara objektif serta membantu mencegah terjadinya manipulasi data atau menyembunyian informasi penting (Maharani *et al.*, 2024).
- c. **Penerapan kode etik dan kebijakan anti-korupsi.** Kode etik perusahaan serta kebijakan anti-korupsi merupakan bagian penting dari sistem tata kelola yang bertujuan menjaga integritas organisasi. Kebijakan tersebut mengatur standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi, termasuk larangan terhadap praktik suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan. Dengan menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang

menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalisme (Carroll & Brown, 2022).

- d. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan, regulasi, serta standar etika yang berlaku. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko operasional, finansial, maupun reputasi serta mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Pengendalian internal yang kuat juga membantu meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam pengelolaan perusahaan (Schaltegger *et al.*, 2022).

4. Peran ESG dalam Mendorong Bisnis Berkelanjutan

Kerangka ESG menjadi alat penting dalam membantu perusahaan mengukur dan meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka. Dengan menerapkan prinsip ESG, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, ESG juga menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam menentukan keputusan investasi karena perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik dianggap lebih stabil dan memiliki prospek jangka panjang yang lebih kuat (OECD, 2023). Beberapa kontribusi ESG terhadap keberlanjutan bisnis antara lain:

- a. Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mendorong perusahaan untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola organisasi. Transparansi ini

memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk investor dan masyarakat, untuk memahami bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya secara bertanggung jawab. Selain itu, transparansi juga membantu memperkuat sistem akuntabilitas dalam organisasi sehingga setiap kebijakan dan keputusan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Dalam konteks ini, praktik ESG dan pelaporan keberlanjutan berperan penting sebagai sarana komunikasi yang meningkatkan kepercayaan, kredibilitas, serta keterlibatan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Kaya, 2025).

- b. Membantu perusahaan mengelola risiko lingkungan dan sosial secara lebih efektif. ESG memberikan kerangka kerja yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Misalnya, perusahaan dapat mengantisipasi risiko perubahan iklim, konflik dengan masyarakat, atau pelanggaran hak tenaga kerja melalui kebijakan yang lebih proaktif. Dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas operasional serta meminimalkan potensi kerugian di masa depan (Schaltegger *et al.*, 2022).
- c. Meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik biasanya dipandang lebih kredibel dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari para investor, pelanggan, maupun masyarakat. Kepercayaan tersebut

menjadi modal penting bagi perusahaan dalam memperoleh dukungan investasi, memperluas pasar, serta menjaga hubungan jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan (OECD, 2023).

- d. Mendorong inovasi dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Penerapan ESG juga mendorong perusahaan untuk mengembangkan inovasi dalam berbagai aspek operasional, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Inovasi tersebut tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menciptakan peluang bisnis baru yang mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang (Elkington, 2020).

4.5. Praktik Terbaik Keberlanjutan di Perusahaan Nasional dan Global

Praktik terbaik (*best practices*) keberlanjutan dalam perusahaan nasional dan global merujuk pada berbagai strategi, kebijakan, serta tindakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Praktik ini mencerminkan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis perusahaan sehingga organisasi tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks bisnis modern, praktik keberlanjutan sering dikaitkan dengan penerapan konsep triple bottom line,

yaitu keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional perusahaan (Elkington, 2020).

Pada tingkat global, banyak perusahaan multinasional telah mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam model bisnis mereka sebagai bagian dari strategi korporasi jangka panjang. Perusahaan-perusahaan global menerapkan berbagai inisiatif seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan. Praktik tersebut biasanya didukung oleh standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau kerangka *Environmental, Social, Governance* (ESG) yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat (OECD, 2023).

Di tingkat nasional, banyak perusahaan juga mulai mengadopsi praktik keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan strategi bisnis jangka panjang. Perusahaan nasional umumnya menerapkan program-program keberlanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Implementasi keberlanjutan di tingkat nasional juga sering didukung oleh kebijakan pemerintah dan regulasi yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara lebih bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mematuhi standar

hukum, tetapi juga untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika (Carroll & Brown, 2022).

Praktik terbaik keberlanjutan terlihat dalam pengelolaan rantai pasok (*supply chain*) yang bertanggung jawab. Banyak perusahaan global maupun nasional mulai menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnis mereka juga mematuhi standar etika, lingkungan, dan sosial yang sama. Pendekatan ini penting karena keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan operasional internal, tetapi juga oleh praktik bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok perusahaan. Dengan menerapkan standar keberlanjutan dalam rantai pasok, perusahaan dapat mengurangi risiko reputasi serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen keberlanjutan perusahaan (Schaltegger *et al.*, 2022).

Secara keseluruhan, praktik terbaik keberlanjutan di perusahaan nasional dan global menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis modern. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam model bisnisnya tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, tetapi juga memperoleh manfaat strategis seperti peningkatan reputasi, kepercayaan investor, serta ketahanan bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, penerapan praktik terbaik keberlanjutan menjadi faktor kunci dalam menciptakan perusahaan yang bertanggung jawab, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (OECD, 2023).

RUANG EKSPLORASI

1. “Sebuah perusahaan manufaktur memperoleh keuntungan yang besar dari kegiatan produksinya. Namun, aktivitas produksi tersebut menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan keluhan dari masyarakat setempat. Di sisi lain, perusahaan tersebut memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah tersebut.”

Pertanyaan:

Analisis kasus tersebut dengan menggunakan konsep keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*). Bagaimana perusahaan seharusnya menyeimbangkan ketiga aspek tersebut agar kegiatan bisnisnya tetap berkelanjutan?

2. “Perusahaan modern tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Hal ini menuntut adanya integrasi antara etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.”

Pertanyaan:

Menurut Anda, bagaimana peran etika bisnis dan tata kelola perusahaan dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan? Jelaskan dengan memberikan contoh bagaimana keputusan manajemen yang etis dapat mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

3. “Sebuah perusahaan besar melaksanakan berbagai program CSR seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan bantuan bagi masyarakat sekitar. Namun, beberapa pihak menilai bahwa program tersebut hanya dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan, sementara aktivitas operasional perusahaan masih menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.”

Pertanyaan:

Analisis apakah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kasus tersebut benar-benar mencerminkan tanggung jawab etis perusahaan. Jelaskan bagaimana program CSR seharusnya dirancang agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

4. “Banyak investor saat ini mulai mempertimbangkan faktor *Environmental, Social, Governance* (ESG) sebelum menanamkan modal pada suatu perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik ternyata mendapatkan penilaian ESG yang rendah karena kurang memperhatikan isu lingkungan dan transparansi manajemen.”

Pertanyaan:

Analisis bagaimana faktor ESG (*Environmental, Social, Governance*) dapat memengaruhi keputusan investasi dan reputasi perusahaan. Mengapa indikator ESG menjadi penting dalam menilai keberlanjutan sebuah bisnis?

5. “Banyak perusahaan nasional maupun global telah menerapkan berbagai strategi keberlanjutan seperti

pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, serta program pemberdayaan masyarakat.”

Tugas Proyek:

Pilih satu perusahaan nasional atau internasional yang dikenal memiliki praktik bisnis berkelanjutan. Kemudian lakukan analisis yang mencakup:

- a. Strategi keberlanjutan yang diterapkan perusahaan tersebut.
- b. Integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kebijakan perusahaan.
- c. Peran CSR dan ESG dalam mendukung keberlanjutan perusahaan.
- d. Pelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan lain dari praktik tersebut.

Hasil proyek disusun dalam bentuk laporan analisis atau presentasi akademik dengan dukungan referensi yang relevan.

Bab 5

Strategi Implementasi dan Penguatan Sinergi

Strategi implementasi sinergi dalam organisasi biasanya dimulai dengan integrasi nilai-nilai etika dan tata kelola ke dalam visi, misi, serta strategi perusahaan. Integrasi ini memastikan bahwa prinsip-prinsip etika, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan menjadi bagian dari arah strategis perusahaan. Ketika nilai-nilai tersebut tertanam dalam strategi organisasi, maka setiap kebijakan dan keputusan manajemen akan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini membantu perusahaan membangun sistem bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (Carroll & Brown, 2022).

Selain integrasi dalam strategi perusahaan, penguatan sinergi juga memerlukan dukungan dari struktur tata kelola yang efektif. Tata kelola perusahaan yang baik menyediakan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memastikan bahwa kebijakan dan strategi organisasi dijalankan sesuai dengan prinsip etika dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, peran dewan direksi, dewan komisaris, serta berbagai komite pengawasan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa

implementasi strategi dilakukan secara konsisten dan akuntabel. Dengan adanya sistem tata kelola yang kuat, perusahaan dapat mengelola risiko secara lebih efektif serta menjaga integritas dalam pengambilan keputusan bisnis (OECD, 2023).

Penguatan sinergi juga berkaitan dengan pembangunan budaya organisasi yang mendukung penerapan nilai-nilai etika dan keberlanjutan. Budaya organisasi yang berlandaskan integritas dan tanggung jawab akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan standar etika perusahaan. Budaya ini biasanya dibangun melalui kepemimpinan yang memberikan teladan, sistem pelatihan dan pengembangan karyawan, serta penerapan kode etik perusahaan yang jelas. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat, implementasi strategi sinergi dapat berjalan lebih efektif karena didukung oleh komitmen seluruh anggota organisasi (Agoes & Ardana, 2019).

Selain itu, strategi implementasi sinergi juga memerlukan sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif di dalam organisasi. Komunikasi yang terbuka memungkinkan seluruh bagian organisasi memahami tujuan strategis perusahaan serta peran masing-masing dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui komunikasi yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan etika, tata kelola, dan keberlanjutan dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit organisasi. Hal ini juga membantu meningkatkan transparansi serta memperkuat kerja sama antarbagian dalam organisasi (Schaltegger *et al.*, 2022).

Pada akhirnya, strategi implementasi dan penguatan sinergi juga memerlukan proses evaluasi dan pemantauan

secara berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan penilaian secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan strategi yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Proses evaluasi ini biasanya dilakukan melalui audit internal, laporan kinerja keberlanjutan, serta pengukuran indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan melakukan evaluasi secara konsisten, perusahaan dapat terus memperbaiki strategi implementasi serta memperkuat sinergi antara berbagai elemen penting dalam organisasi (OECD, 2023).

5.1. Tantangan Implementasi Etika dan Tata Kelola di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara organisasi menjalankan aktivitas bisnis, termasuk dalam penerapan etika dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperluas akses terhadap informasi. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan baru terkait dengan transparansi, keamanan data, privasi, serta pengawasan terhadap aktivitas digital perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan sistem tata kelola dan standar etika agar mampu menghadapi dinamika lingkungan bisnis digital yang semakin kompleks (Kamandanu, 2025).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi etika dan tata kelola di era digital adalah meningkatnya risiko terkait keamanan data dan privasi informasi. Perusahaan saat ini

mengelola data dalam jumlah yang sangat besar, termasuk data pribadi pelanggan, informasi keuangan, serta data operasional yang sensitif. Pengelolaan data tersebut menuntut perusahaan untuk menerapkan standar etika yang tinggi dalam melindungi informasi serta memastikan bahwa penggunaan data dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kegagalan dalam melindungi data dapat menimbulkan pelanggaran etika yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik dan kerugian reputasi perusahaan (OECD, 2023).

Tantangan lainnya berkaitan dengan kompleksitas pengawasan dan pengendalian dalam lingkungan digital. Digitalisasi memungkinkan proses bisnis dilakukan secara lebih cepat dan terdesentralisasi, sehingga pengawasan terhadap aktivitas organisasi menjadi lebih sulit dibandingkan dengan sistem konvensional. Dalam situasi ini, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi agar aktivitas digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sistem tata kelola yang adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengurangi kualitas pengawasan organisasi (Schaltegger *et al.*, 2022).

Selain itu, era digital juga memunculkan tantangan etika yang berkaitan dengan penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analisis data besar (*big data*), serta otomatisasi proses bisnis. Teknologi-teknologi tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan, namun juga menimbulkan pertanyaan etis terkait bias algoritma, keadilan dalam pengambilan keputusan otomatis, serta dampaknya terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu,

perusahaan perlu mengembangkan kerangka etika digital yang memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu (Carroll & Brown, 2022). Beberapa tantangan utama implementasi etika dan tata kelola di era digital antara lain:

1. Perlindungan data dan privasi pengguna, yang menjadi isu penting dalam pengelolaan informasi digital perusahaan (OECD, 2023).
2. Pengawasan terhadap aktivitas digital perusahaan, yang semakin kompleks akibat penggunaan teknologi dan sistem yang terintegrasi secara global (Adam *et al.*, 2025).
3. Etika penggunaan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar dalam pengambilan keputusan organisasi (Carroll & Brown, 2022).
4. Penyesuaian sistem tata kelola terhadap transformasi digital, agar perusahaan tetap dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat (Schaltegger *et al.*, 2022).

Dengan demikian, implementasi etika dan tata kelola di era digital memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Perusahaan tidak hanya perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, tetapi juga harus mengembangkan kebijakan etika digital yang mampu mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Integrasi antara etika, tata kelola perusahaan, serta pemanfaatan teknologi yang bijak akan membantu organisasi menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis di era digital yang terus berkembang (OECD, 2023).

5.2. Pengembangan Budaya Organisasi yang Beretika

Pengembangan budaya organisasi yang beretika merupakan proses membangun nilai, norma, dan perilaku dalam organisasi yang berlandaskan pada prinsip integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap standar moral dan hukum. Budaya organisasi yang beretika berperan penting dalam membentuk perilaku individu dan kelompok dalam perusahaan sehingga setiap aktivitas bisnis dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks organisasi modern, budaya etis tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga menjadi bagian dari strategi organisasi dalam menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Agoes & Ardana, 2019).

Pengembangan budaya organisasi yang beretika biasanya dimulai dengan penanaman nilai-nilai etika dalam visi, misi, dan nilai inti perusahaan. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan yang mengarahkan perilaku seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika nilai etika terintegrasi dalam arah strategis organisasi, maka setiap kebijakan, prosedur, dan keputusan yang diambil oleh manajemen akan mencerminkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Integrasi ini juga membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek moral dan kepentingan para pemangku kepentingan (Carroll & Brown, 2022).

Peran kepemimpinan sangat penting dalam pengembangan budaya organisasi yang beretika. Pemimpin organisasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan

dalam penerapan nilai-nilai etika serta memastikan bahwa standar moral diterapkan secara konsisten dalam kegiatan organisasi. Kepemimpinan yang beretika akan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemimpin juga berperan dalam menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang memastikan bahwa perilaku organisasi tetap sejalan dengan prinsip etika yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kepemimpinan etis tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai teladan yang menanamkan nilai moral dalam organisasi serta membentuk budaya kerja yang berintegritas (Ustien, 2025).

Pengembangan budaya organisasi yang beretika juga memerlukan dukungan kebijakan dan sistem yang jelas dalam organisasi. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui penyusunan kode etik perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi. Kode etik biasanya memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, mitra bisnis, serta masyarakat. Dengan adanya kode etik yang jelas, organisasi dapat menciptakan standar perilaku yang konsisten serta memberikan pedoman bagi karyawan dalam menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan dilema etika dalam pekerjaan (OECD, 2023).

Selain itu, pengembangan budaya organisasi yang beretika juga memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi karyawan. Program pelatihan etika

membantu meningkatkan pemahaman karyawan mengenai standar perilaku yang diharapkan dalam organisasi serta memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang melibatkan pertimbangan etika. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, organisasi dapat memperkuat kesadaran etika di seluruh tingkat organisasi sehingga nilai-nilai etika dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik kerja sehari-hari (Carroll & Brown, 2022).

Budaya organisasi yang beretika juga didukung oleh adanya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang efektif. Organisasi perlu menyediakan sistem yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran etika secara aman dan transparan, seperti melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Sistem ini menjadi bagian penting dalam *Good Corporate Governance* (GCG) karena dapat meningkatkan transparansi serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik ditangani secara adil dan konsisten sesuai dengan kebijakan organisasi. Penerapan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terbukti mampu memperkuat budaya integritas serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi (Kamandanu, 2025).

Dengan demikian, pengembangan budaya organisasi yang beretika merupakan proses yang melibatkan berbagai elemen penting dalam organisasi, mulai dari kepemimpinan, nilai-nilai perusahaan, kebijakan organisasi, hingga sistem pengawasan dan pendidikan etika. Ketika budaya etis berhasil diterapkan

secara konsisten, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku profesional, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat keberlanjutan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang (OECD, 2023).

5.3. Penguatan Sistem Kepatuhan (*Compliance System*)

Penguatan sistem kepatuhan (*compliance system*) merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar etika, serta kebijakan internal perusahaan. Sistem kepatuhan menjadi bagian penting dalam tata kelola perusahaan karena berfungsi sebagai mekanisme yang membantu organisasi meminimalkan risiko hukum, menjaga integritas operasional, serta memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam praktik tata kelola modern, sistem kepatuhan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan (Adam *et al.*, 2025).

Penguatan sistem kepatuhan biasanya dimulai dengan pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai standar perilaku dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek seperti kepatuhan terhadap regulasi industri, standar etika bisnis, perlindungan data, serta kebijakan anti-korupsi dan anti-suap. Dengan adanya kebijakan yang jelas, perusahaan dapat memberikan pedoman yang konsisten bagi karyawan

dalam menjalankan aktivitas bisnis sehingga risiko pelanggaran hukum dan etika dapat diminimalkan. Kebijakan kepatuhan yang efektif juga harus disesuaikan dengan perkembangan regulasi serta dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah (OECD, 2023).

Selain penyusunan kebijakan, penguatan sistem kepatuhan juga memerlukan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan secara efektif. Banyak perusahaan membentuk unit atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan organisasi terhadap berbagai regulasi dan kebijakan internal. Fungsi ini biasanya dikenal sebagai unit kepatuhan (*compliance unit*) yang memiliki tugas untuk memantau implementasi kebijakan, memberikan konsultasi kepada manajemen mengenai aspek kepatuhan, serta melakukan evaluasi terhadap potensi risiko hukum dan etika dalam kegiatan perusahaan. Keberadaan fungsi kepatuhan yang independen sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan dilakukan secara objektif dan profesional (Carroll & Brown, 2022).

Penguatan sistem kepatuhan juga berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap pentingnya kepatuhan dalam organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai regulasi, standar etika, serta kebijakan perusahaan. Program pelatihan ini membantu karyawan memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kepatuhan organisasi serta memberikan kemampuan untuk mengenali dan menghindari potensi pelanggaran dalam aktivitas kerja sehari-

hari. Dengan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya kepatuhan, perusahaan dapat menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab (Agoes & Ardana, 2019).

Selain pendidikan dan pelatihan, penguatan sistem kepatuhan juga memerlukan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif. Perusahaan perlu memiliki sistem yang memungkinkan pelaporan terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran kebijakan perusahaan secara aman dan transparan. Mekanisme ini sering diwujudkan dalam bentuk sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang memberikan perlindungan kepada individu yang melaporkan pelanggaran. Sistem tersebut membantu organisasi mendeteksi masalah sejak dini serta memungkinkan manajemen mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar terhadap perusahaan (OECD, 2023).

Penguatan sistem kepatuhan juga memerlukan proses evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui audit internal, penilaian risiko kepatuhan, serta peninjauan terhadap kebijakan perusahaan untuk memastikan bahwa sistem kepatuhan tetap relevan dengan perkembangan regulasi dan kondisi bisnis. Dalam praktiknya, audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang sistematis untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi (Rahandri *et al.*, 2024).

Dengan demikian, penguatan sistem kepatuhan merupakan elemen penting dalam menciptakan organisasi yang

transparan, bertanggung jawab, dan berintegritas. Sistem kepatuhan yang efektif tidak hanya membantu perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Melalui integrasi kebijakan yang jelas, struktur pengawasan yang kuat, pendidikan karyawan, serta mekanisme pelaporan yang transparan, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan standar hukum dan etika yang telah ditetapkan (Carroll & Brown, 2022).

5.4. Peran Kepemimpinan Etis dalam Menjaga Integritas Bisnis

Kepemimpinan etis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga integritas bisnis dan memastikan bahwa organisasi menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab dan transparan. Kepemimpinan etis mengacu pada kemampuan pemimpin untuk mengarahkan organisasi dengan berlandaskan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Dalam konteks tata kelola perusahaan, pemimpin tidak hanya bertugas mengelola organisasi secara efektif, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip etika serta kepentingan para pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang beretika juga berperan dalam membangun sistem nilai organisasi yang kuat serta menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas (Ustien, 2025).

1. Menjadi Teladan dalam Penerapan Nilai Etika

Salah satu peran utama kepemimpinan etis adalah memberikan teladan dalam penerapan nilai-nilai etika di dalam

organisasi. Pemimpin yang berintegritas akan menunjukkan perilaku yang konsisten dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap aktivitas bisnis. Keteladanan ini sangat penting karena perilaku pemimpin sering kali menjadi acuan bagi karyawan dalam menentukan standar perilaku yang dianggap dapat diterima dalam organisasi. Ketika pemimpin secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etika, maka karyawan akan lebih terdorong untuk mengikuti standar perilaku yang sama dalam menjalankan tugas mereka (Carroll & Brown, 2022).

2. Membangun Budaya Organisasi yang Berintegritas

Kepemimpinan etis juga berperan penting dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas. Budaya organisasi yang beretika tercipta ketika nilai-nilai moral menjadi bagian dari norma dan praktik kerja sehari-hari dalam perusahaan. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip etika tidak hanya menjadi slogan organisasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan, prosedur, dan perilaku kerja seluruh anggota organisasi. Dengan membangun budaya yang berintegritas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendorong transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas bisnis (Agoes & Ardana, 2019).

3. Mengarahkan Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab

Peran penting lainnya dari kepemimpinan etis adalah memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pemangku

kepentingan. Dalam praktik bisnis modern, keputusan perusahaan tidak hanya memengaruhi pemegang saham, tetapi juga karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemimpin perlu mempertimbangkan aspek etika dalam setiap keputusan yang diambil agar kebijakan perusahaan tidak merugikan pihak lain serta tetap sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (OECD, 2023).

4. Memperkuat Sistem Tata Kelola dan Pengawasan

Kepemimpinan etis juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem tata kelola perusahaan serta mekanisme pengawasan internal. Pemimpin yang berkomitmen terhadap integritas akan memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, kebijakan kepatuhan yang jelas, serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang transparan. Dalam praktiknya, kepemimpinan yang beretika mendorong penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, sehingga sistem pengawasan internal dapat berjalan secara optimal (Adam *et al.*, 2025).

5. Membangun Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Kepemimpinan etis juga berperan dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Pemimpin yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etika akan mampu menciptakan citra perusahaan yang terpercaya dan bertanggung jawab. Kepercayaan yang kuat dari pemangku kepentingan dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan, termasuk stabilitas bisnis dan keberlanjutan organisasi (Carroll & Brown, 2022).

5.5. Arah Masa Depan Etika dan Tata Kelola Menuju Bisnis Berkelanjutan

Perkembangan dunia bisnis global menunjukkan bahwa etika dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) akan semakin memainkan peran penting dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, arah masa depan etika dan tata kelola perusahaan akan semakin terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Integrasi tersebut menjadi landasan penting bagi perusahaan untuk menjaga legitimasi, reputasi, serta keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

1. Integrasi Etika, Tata Kelola, dan Keberlanjutan dalam Strategi Bisnis

Arah masa depan etika dan tata kelola perusahaan akan semakin menekankan integrasi antara prinsip etika, tata kelola yang baik, serta strategi keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi. Perusahaan di masa depan dituntut untuk menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari strategi inti perusahaan, bukan sekadar program tambahan atau kegiatan tanggung jawab sosial. Integrasi ini mendorong organisasi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan sekaligus mengurangi risiko yang berkaitan dengan isu lingkungan dan sosial (Carroll & Brown, 2022).

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas melalui Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital juga akan memengaruhi arah masa depan etika dan tata kelola perusahaan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan meningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja, termasuk pelaporan keberlanjutan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, Governance* atau ESG). Di masa depan, perusahaan diharapkan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai dampak kegiatan bisnis mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Transparansi yang lebih tinggi akan meningkatkan akuntabilitas perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang dijalankan (OECD, 2023).

3. Penguatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan

Arah masa depan tata kelola perusahaan juga menunjukkan peningkatan perhatian terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Jika sebelumnya perusahaan lebih berfokus pada kepentingan pemegang saham (*shareholders*), kini banyak organisasi mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan kepentingan karyawan, pelanggan, masyarakat, serta lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai sosial yang positif bagi masyarakat. Dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan secara lebih luas,

perusahaan dapat memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan bisnisnya (Schaltegger *et al.*, 2022).

4. Penguatan Budaya Organisasi yang Beretika

Di masa depan, keberhasilan penerapan etika dan tata kelola perusahaan juga akan sangat bergantung pada kekuatan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Budaya organisasi yang beretika berperan dalam memastikan bahwa prinsip tata kelola tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga menjadi bagian dari perilaku sehari-hari dalam organisasi. Kepemimpinan yang berintegritas, sistem pendidikan etika bagi karyawan, serta penerapan kode etik yang konsisten akan menjadi faktor penting dalam membangun budaya organisasi yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Dengan budaya organisasi yang kuat, perusahaan dapat lebih mudah menghadapi berbagai tantangan etika yang muncul dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks (Agoes & Ardana, 2019).

5. Penguatan Standar Global dalam Praktik Tata Kelola dan Keberlanjutan

Arah masa depan etika dan tata kelola juga menunjukkan peningkatan penggunaan standar global dalam praktik bisnis. Berbagai organisasi internasional telah mengembangkan pedoman dan kerangka kerja yang membantu perusahaan menerapkan prinsip tata kelola dan keberlanjutan secara konsisten. Standar global tersebut memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengelola risiko, meningkatkan transparansi, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis. Dengan mengadopsi standar internasional, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas serta memperkuat daya saing di

pasar global yang semakin menuntut praktik bisnis yang bertanggung jawab (OECD, 2023).

RUANG EKSPLORASI

1. “Sebuah perusahaan *e-commerce* berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi digital dan analisis data pelanggan. Namun, perusahaan tersebut menghadapi kritik karena diduga menggunakan data pribadi pelanggan tanpa transparansi yang memadai mengenai bagaimana data tersebut digunakan.”

Pertanyaan:

Analisis tantangan implementasi etika bisnis dan tata kelola perusahaan di era digital berdasarkan kasus tersebut. Bagaimana perusahaan seharusnya mengelola penggunaan teknologi dan data agar tetap mematuhi prinsip etika dan tata kelola yang baik?

2. “Dalam sebuah perusahaan, manajemen telah menyusun berbagai aturan dan kode etik perusahaan. Namun, dalam praktiknya masih banyak karyawan yang melanggar aturan tersebut karena budaya kerja yang terlalu menekankan pencapaian target tanpa memperhatikan proses yang etis.”

Pertanyaan:

Menurut Anda, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan budaya organisasi yang beretika sehingga nilai-nilai etika tidak hanya menjadi aturan tertulis tetapi juga menjadi bagian dari perilaku sehari-hari dalam organisasi?

3. “Sebuah perusahaan jasa keuangan pernah terlibat dalam kasus pelanggaran regulasi karena lemahnya pengawasan terhadap aktivitas transaksi internal. Setelah kejadian tersebut, perusahaan berencana memperkuat sistem kepatuhan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.”

Pertanyaan:

Analisis bagaimana sistem kepatuhan (*compliance system*) yang efektif dapat membantu perusahaan mencegah pelanggaran hukum dan etika. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkuat sistem kepatuhan tersebut.

4. “Seorang direktur utama sebuah perusahaan dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil. Namun, dalam beberapa situasi ia menoleransi praktik yang kurang etis selama hal tersebut mampu meningkatkan keuntungan perusahaan.”

Pertanyaan:

Evaluasi peran kepemimpinan etis dalam menjaga integritas bisnis berdasarkan kasus tersebut. Bagaimana sikap dan keputusan pemimpin dapat memengaruhi budaya etika dan tata kelola dalam organisasi?

5. “Perkembangan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan menuntut organisasi untuk terus memperkuat praktik etika dan tata kelola perusahaan.”

Tugas Proyek:

Rancang sebuah strategi implementasi etika dan tata kelola perusahaan yang adaptif terhadap masa depan bisnis dengan mempertimbangkan:

- a. Tantangan era digital dan globalisasi.
- b. Penguatan budaya organisasi yang beretika.
- c. Integrasi sistem kepatuhan dan tata kelola perusahaan.
- d. Peran kepemimpinan dalam menjaga integritas organisasi.

Hasil proyek disusun dalam bentuk analisis konseptual atau rencana strategi organisasi yang sistematis dan didukung oleh referensi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S., et al. (2025). *Good Corporate Governance: Konsep, Teori, Regulasi, dan Praktik*. Yogyakarta: Eureka Media Aksara.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2019). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alamudi, W. (2025). Peran Etika Bisnis dalam Membangun Reputasi Perusahaan di Era Ekonomi Digital. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (17th ed.). Pearson Education.
- Arianto, B. (2024). *Etika Bisnis dan Profesi*. Kalimantan Timur: Borneo Novelty Publishing.
- Aziz, F. A. (2025). *Etika Bisnis: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Bandung: Widina Media Utama.
- Badawi, B., & Hartati, W. (2024). *Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Carroll, A. B., & Brown, J. A. (2022). *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management* (11th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2019). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability*

in the age of globalization (4th ed.). Oxford University Press.

Desviani, D. P., et al. (2025). Good Corporate Governance dan informasi akuntansi: Keseimbangan antara tanggung jawab kepada pemegang saham dan stakeholder. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 172–177.

Elkington, J. (2020). *Green Swans: The Coming Boom in Regenerative Capitalism*. London: Fast Company Press.

Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2021). *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.

Firmansyah, H., et al. (2021). *Etika Bisnis: Suatu Pengantar*. Jakarta: Insania.

Hartati, H. (2025). *Etika Bisnis 5.0: Navigasi Moral di Era Industri Digital*.

Junanda, L. R. (2024). Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dan peran akuntansi dalam mendukung keberlanjutan bisnis di era digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 599–610.

Kamandanu, M. A. (2025). *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*. Denpasar: Ganesha Kreasi Semesta.

Karsono, B. (2023). *Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*. Jakarta: Penerbit Akademik.

Karyanto, B. (2024). *Etika Bisnis: Kajian Teori dan Penerapan pada Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Kaya, N. (2025). Evaluating ESG practices from the perspective of corporate governance. *Sustainability*, 17(23), 10440. <https://doi.org/10.3390/su172310440>

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Maharani, E. N., Akbar, A. M., Maheswari, J. L., & Suwarsit. (2024). Penerapan good corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 384–393.
- Mallin, C. A. (2016). *Corporate Governance* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Munifah. (2023). *Pengendalian Internal Sistem Informasi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- OECD. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Purwatiningsih, A. P. (2022). *Buku Ajar Etika Bisnis & Corporate Social Responsibility*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.
- Rahandri, D., et al. (2024). *Good Corporate Governance*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Ris, H. (2022). *Etika dan Hukum Bisnis*. Jakarta: STIE IPWIJA.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting Information Systems* (15th ed.). Pearson Education.
- Rossouw, D., & Van Vuuren, L. (2020). *Codes of Ethics Handbook*. Pretoria: The Ethics Institute of South Africa.
- Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. (2022). Business models for sustainability: A co-evolutionary analysis of sustainable entrepreneurship, innovation, and transformation. *Organization & Environment*, 35(1), 1–30. <https://doi.org/10.1177/1086026621999680>

- Siwiyanti, L. (2024). *Etika Bisnis dan Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Nilai*. Yogyakarta: Deepublish.
- Solomon, J. (2020). *Corporate Governance and Accountability* (5th ed.). West Sussex: John Wiley & Sons.
- Sudarmanto, Eko, et al. (2024). *Sistem Pengendalian Internal Berbasis Risiko*. Yogyakarta: Minhaj Pustaka.
- Sulistiyandari, S., Hidayat, C. M., & Sunarko, B. (2023). *Pentingnya Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Reputasi dan Kinerja Perusahaan*. Penerbit Adab.
- Suryanti, H. (2025). *Tata Kelola Perusahaan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Malang: Unisma Press.
- Ustien, D. O. (2025). *Etika Bisnis: Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: Ganesha Kreasi Semesta.
- Zahada Sabhira, S., & Umar Fadhilah, M. (2024). Analisis Prinsip Good Corporate Governance dalam Regulasi Hukum Perusahaan. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 146–151. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1109>

Sinergi Etika Bisnis dan Tata Kelola: Pilar Utama Bisnis yang Berkelanjutan

ORIGINALITY REPORT

19%	15%	13%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%
★ adcp.co.id
Internet Source

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		